

**PENGARUH DEWAN KOMISARIS SYARIAH, KOMITE
AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL,
PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX
AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI
JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE TAHUN 2020-2024**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagai persyaratan Mencapai Gelar

Sarjana S1 Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Aksit Ristianingsih

31402200156

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI
SEMARANG
2025**

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI

PENGARUH DEWAN KOMISARIS SYARIAH, KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE TAHUN 2020-2024



Semarang, 9 Juli 2025

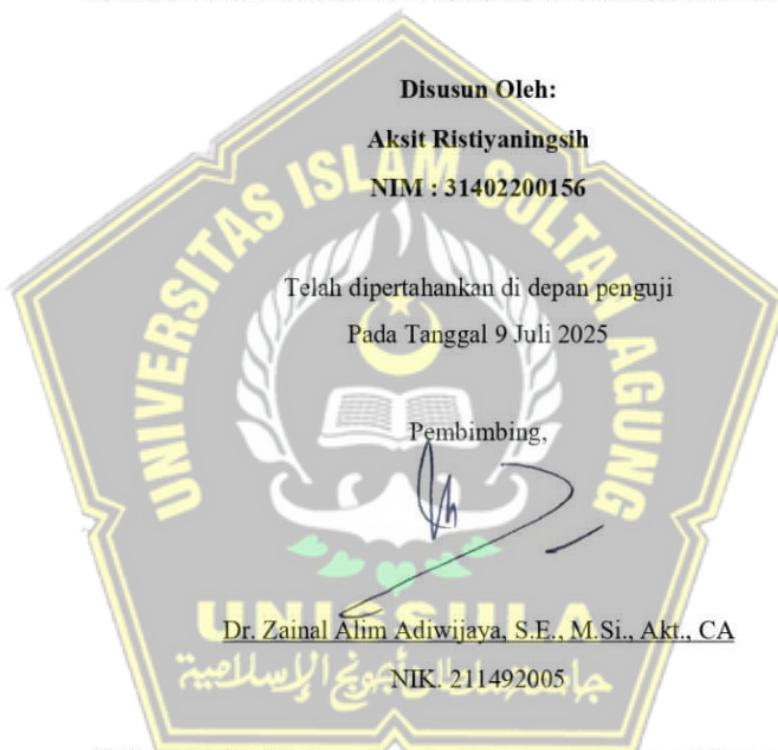
Pembimbing,

Dr. Zainal Alim Adiwijaya, S.E., M.Si., Akt., CA

NIK. 211492005

HALAMAN PERSETUJUAN

PENGARUH DEWAN KOMISARIS SYARIAH, KOMITE AUDIT, KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, PROFITABILITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DI JAKARTA ISLAMIC INDEX PERIODE TAHUN 2020-2024



Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi

Ketua Program Studi Akuntansi

Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., Ph.D.

NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Nama : Aksit Ristyaningsih

NIM : 31402200156

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : S1 Akuntansi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penelitian skripsi yang berjudul “Pengaruh Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index Periode Tahun 2020-2024” adalah benar-benar hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi atau duplikasi dari karya orang lain. Pendapat orang lain yang terdapat dalam penelitian skripsi ini dikutip berdasarkan kode etik ilmiah. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah hasil plagiasi dari karya tulis orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Semarang, 9 Juli 2025



Aksit Ristyaningsih
NIM. 31402200156

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aksit Ristianingsih

NIM : 31402200156

Fakultas : Ekonomi

Program Studi : S1 Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah berupa **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*** dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index Periode Tahun 2020-2024”** menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola, dalam pangkalan data, dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 9 Juli 2025



Aksit Ristianingsih

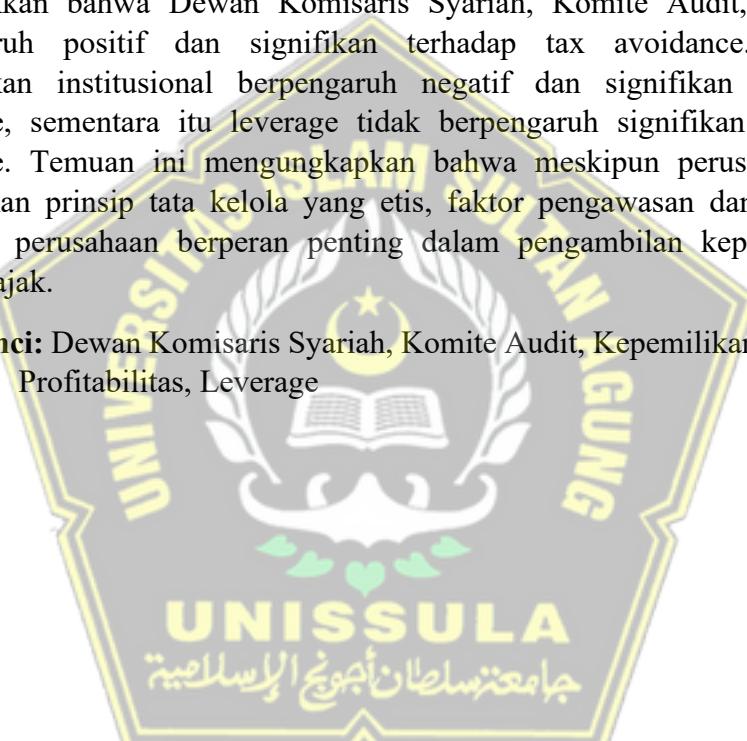
NIM. 31402200156

* Coret yang tidak perlu

ABSTRAK

Dalam era globalisasi, perusahaan menghadapi persaingan yang semakin ketat sehingga memerlukan strategi keuangan yang efektif, termasuk pengelolaan pajak melalui praktik legal seperti tax avoidance. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Leverage terhadap tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) selama periode 2020 hingga 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik purposive sampling dan diperoleh 20 perusahaan sebagai sampel. Data dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Sebaliknya, kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance, sementara itu leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Temuan ini mengungkapkan bahwa meskipun perusahaan syariah menerapkan prinsip tata kelola yang etis, faktor pengawasan dan karakteristik keuangan perusahaan berperan penting dalam pengambilan keputusan terkait strategi pajak.

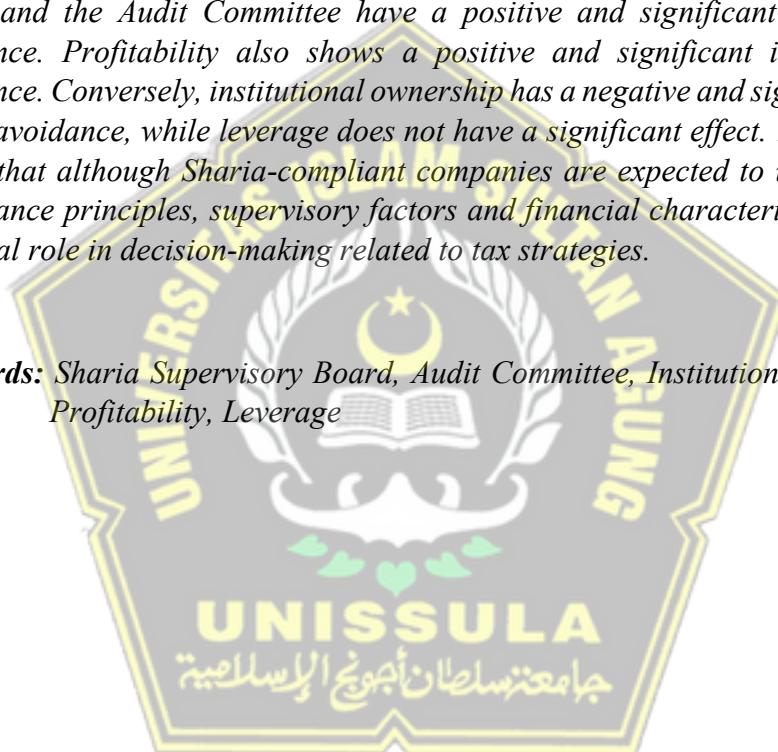
Kata Kunci: Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage



ABSTRACT

In the era of globalization, companies face increasingly intense competition, thereby requiring effective financial strategies, including tax management through legal practices such as tax avoidance. This study aims to analyze the influence of the Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Institutional Ownership, Profitability, and Leverage on tax avoidance in companies listed on the Jakarta Islamic Index (JII) during the 2020–2024 period. A quantitative approach was employed using purposive sampling, resulting in 20 companies selected as the research sample. The data were analyzed using multiple linear regression with the assistance of SPSS software. The results indicate that both the Sharia Supervisory Board and the Audit Committee have a positive and significant effect on tax avoidance. Profitability also shows a positive and significant impact on tax avoidance. Conversely, institutional ownership has a negative and significant effect on tax avoidance, while leverage does not have a significant effect. These findings reveal that although Sharia-compliant companies are expected to uphold ethical governance principles, supervisory factors and financial characteristics still play a crucial role in decision-making related to tax strategies.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Audit Committee, Institutional Ownership, Profitability, Leverage



INTISARI

Tax avoidance merupakan upaya legal perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Meskipun secara hukum tindakan ini tidak melanggar, praktik tersebut sering kali menjadi sorotan karena menimbulkan dilema etis yang kompleks, terutama terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap negara dan masyarakat.

Meskipun tax avoidance dapat memberikan keuntungan finansial jangka pendek bagi perusahaan, praktik ini berpotensi merugikan penerimaan negara yang menjadi sumber utama pendanaan pembangunan. Dalam beberapa kasus, penghindaran pajak dapat menciptakan kesenjangan sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan. Karena krusialnya peran pajak bagi suatu negara, memotivasi penulis untuk melaksanakan penelitian mengenai pengaruh dewan komisaris syariah, komite audit, kepemilikan institusional, profitabilitas, dan leverage terhadap tax avoidance.

Data yang dipergunakan untuk penelitian kuantitatif ini berasal dari sumber data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode Tahun 2020-2024. Sebanyak 20 sampel dikumpulkan dengan memakai pendekatan purposive sampling. Menggunakan perangkat lunak SPSS untuk observasi menganalisi data, melaksanakan analisis regresi linier berganda.

Meskipun dewan komisaris syariah, komite audit serta profitabilitas memiliki pengaruh yang kecil terhadap penghindaran pajak, kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan. Sementara itu leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, berkah dan karunia-Nya selama proses penggerjaan penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “Pengaruh Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Jakarta Islamic Index Periode Tahun 2020-2024” dengan baik. Tujuan penulisan penelitian ini guna memenuhi sebagai persyaratan mencapai gelar sarjana S1 Program Studi Akuntansi.

Penyusunan penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, dukungan dan dari semua pihak baik secara moril maupun materil terutama untuk keluarga penulis yang sangat penulis cintai. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat kedua orangtuaku tersayang. Selain itu, penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, SH., M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Heru Sulistyo, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., IFP., AWP., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sultan Agung Semarang.
4. Ibu Hani Werdi Apriyanti, S.E., M.Si., Ak., CA selaku sekretaris program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
5. Bapak Dr. Zainal Alim Adiwijaya, S.E., M.Si., Akt., CA selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, dan motivasi selama penyusunan penelitian ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah memberi pembelajaran dan ilmu pengetahuan selama menuntut ilmu di Universitas Islam Sultan Agung.

7. Keluarga yang selalu memotivasi, memberi semangat, dan selalu mendukung penulis untuk berproses dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik.
8. Teman - teman penulis yang selalu memberi semangat untuk selalu berproses.
9. Teman – teman kuliah dan bimbingan penulis yang telah membantu dalam proses perkuliahan dan penyusunan penelitian ini.

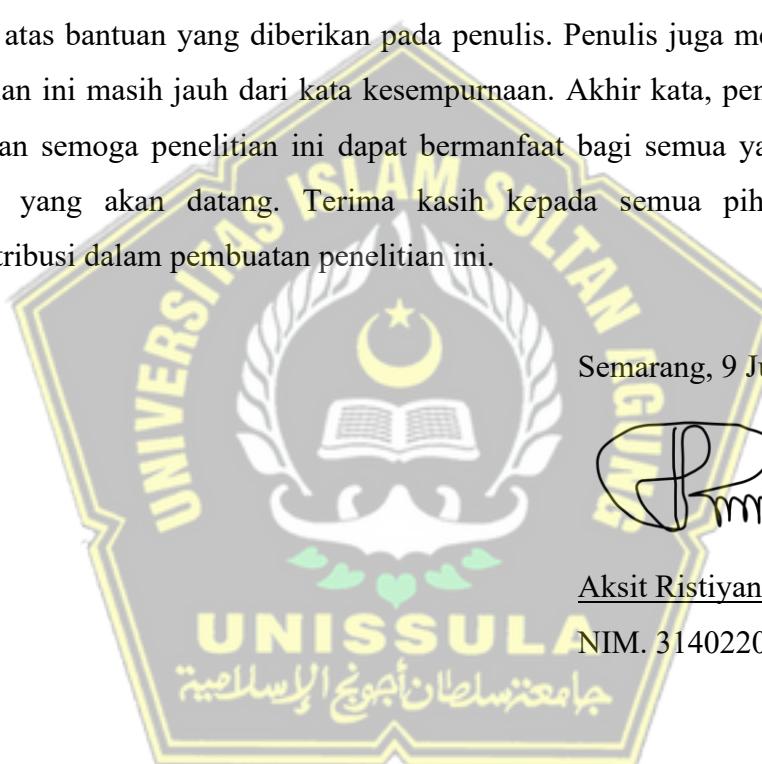
Penulis berharap semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang terbaik atas bantuan yang diberikan pada penulis. Penulis juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Akhir kata, penulis memohon maaf dan semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua yang terlibat dan penulis yang akan datang. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan penelitian ini.

Semarang, 9 Juli 2025



Aksit Ristianingsih

NIM. 31402200156



DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
INTISARI	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Batasan Penelitian.....	8
1.5. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1. Landasan Teori	10
2.1.1. Teori Keagenan.....	10
2.2. Variabel Penelitian.....	11
2.2.1. Partisipasi Dewan Komisaris Syariah.....	11
2.2.2. Komite Audit	12
2.2.3. Kepemilikan Institusional	14
2.2.4. Profitabilitas.....	15
2.2.5. Leverage.....	16
2.2.6. Tax Avoidance	17

2.3.	Penelitian Terdahulu	19
2.4.	Hipotesis Penelitian	23
2.4.1.	Pengaruh Dewan Komisaris Syariah terhadap Tax Avoidance	23
2.4.2.	Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance	24
2.4.3.	Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance.....	25
2.4.4.	Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance	27
2.4.5.	Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance	28
2.5.	Model Penelitian	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	31	
3.1.	Jenis Penelitian	31
3.2.	Populasi dan Sampel.....	31
3.3.	Sumber dan Jenis Data.....	32
3.4.	Metode Pengumpulan Data.....	33
3.5.	Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian.....	33
3.5.1.	Variabel Dependen	33
3.5.2.	Variabel Independen	33
3.5.3.	Definisi Operasional	34
3.6.	Metode Analisis Data.....	38
3.6.1.	Statistik Deskriptif	38
3.6.2.	Uji Asumsi Klasik.....	38
3.6.2.1.	Uji Normalitas.....	38
3.6.2.2.	Uji Heteroskedastisitas	39
3.6.2.3.	Uji Multikolinearitas.....	39
3.6.2.4.	Uji Autokorelasi.....	39
3.6.3.	Analisis Regresi Linear Berganda	39
3.6.4.	Uji Signifikansi Parameter Individual atau Parsial (Uji t).....	40
3.6.5.	Uji Signifikansi Simultan (Uji F).....	40
3.6.6.	Koefisien Determinasi (Uji R ²).....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41	
4.1.	Deskripsi Objek Penelitian	41
4.2.	Hasil Analisis Data	44
4.2.1.	Analisis Statistik Deskriptif	44

4.2.2.	Uji Asumsi Klasik.....	46
4.2.2.1.	Uji Normalitas.....	46
4.2.2.2.	Uji Heteroskedastisitas	49
4.2.2.3.	Uji Multikolinearitas.....	50
4.2.2.4.	Uji Autokorelasi.....	52
4.2.3.	Analisis Regresi Linier Berganda	52
4.2.4.	Uji Hipotesis	54
4.2.4.1.	Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	54
4.2.4.2.	Uji Simultan (Uji F).....	55
4.2.4.3.	Uji Simultan (Uji F).....	56
	Pembahasan.....	56
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1.	Kesimpulan	62
5.2.	Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64	
LAMPIRAN	69	

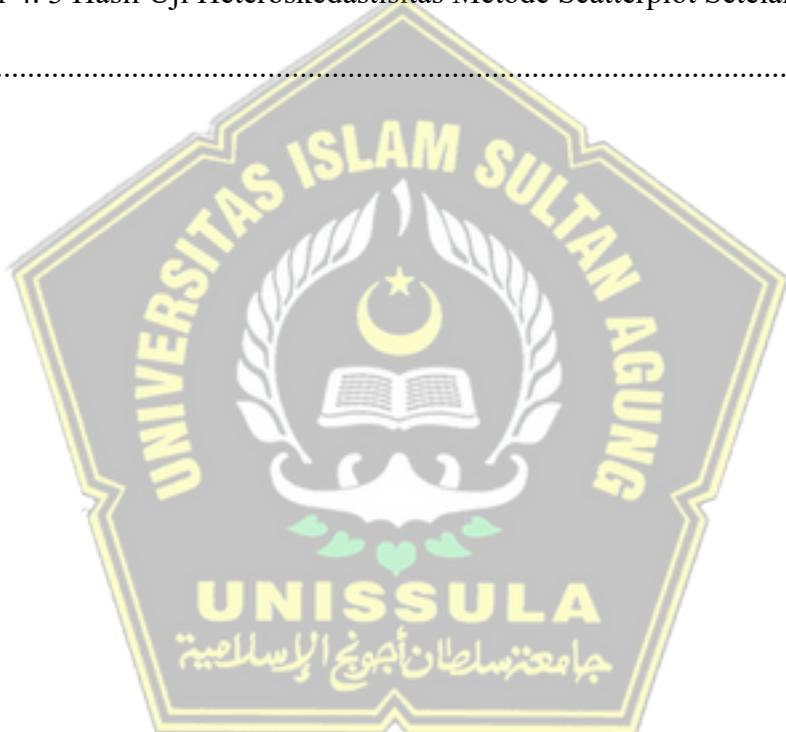


DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator	37
Tabel 4. 1 Daftar Perusahaan yang terdaftar di JII.....	41
Tabel 4. 2 Kriteria Penentuan Sampel.....	42
Tabel 4. 3 Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria.....	43
Tabel 4. 4 Hasil Statistik Deskriptif.....	44
Tabel 4. 5 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Sebelum Transformasi Data	47
Tabel 4. 6 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Sebelum Transformasi Data	49
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum.....	51
Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas Sesudah	51
Tabel 4. 9 Hasil Uji Autokorelasi	52
Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	53
Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi	54
Tabel 4. 12 Hasil Uji Simultan (Uji F).....	55
Tabel 4. 13 Uji Regresi Linier Berganda – Uji t (parsial).....	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Model Penelitian	30
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas P-P Plot Sebelum Transformasi Data	47
Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas P-P Plot Sesudah Transformasi Data	48
Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatterplot Setelah Perbaikan Data	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era globalisasi, persaingan antar perusahaan semakin ketat, sehingga diperlukan strategi keuangan yang optimal untuk mempertahankan eksistensi dan meningkatkan kinerja perusahaan. Salah satu strategi yang sering digunakan oleh perusahaan adalah pengelolaan pajak, termasuk praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Tax avoidance merupakan upaya legal perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Meskipun secara hukum tindakan ini tidak melanggar, praktik tersebut sering kali menjadi sorotan karena menimbulkan dilema etis yang kompleks, terutama terkait dengan tanggung jawab perusahaan terhadap negara dan masyarakat (Wibowo, Mukhibad, & Anita, 2024).

Lebih lanjut, meskipun tax avoidance dapat memberikan keuntungan finansial jangka pendek bagi perusahaan, praktik ini berpotensi merugikan penerimaan negara yang menjadi sumber utama pendanaan pembangunan. Dalam beberapa kasus, penghindaran pajak dapat menciptakan kesenjangan sosial dan mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas perusahaan. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk tidak hanya fokus pada kepentingan bisnis semata, tetapi juga mempertimbangkan aspek keberlanjutan dan kontribusi terhadap perekonomian nasional. Pendekatan yang seimbang antara kepatuhan pajak dan

strategi keuangan yang efektif menjadi kunci dalam menjaga reputasi dan keberlanjutan bisnis di tengah persaingan global yang semakin dinamis.

Dalam konteks perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII), prinsip syariah menjadi pedoman utama dalam menjalankan bisnis. Prinsip ini menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, terutama dalam pelaporan keuangan dan perpajakan. Salah satu bentuk penerapan prinsip syariah adalah melalui tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG). Tujuannya adalah menjaga integritas keuangan perusahaan sekaligus mengurangi risiko praktik penghindaran pajak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika (Risqiyah & Pramuka, 2021). Penerapan Islamic Corporate Governance pada perusahaan syariah tidak hanya membantu mematuhi aturan pajak, tetapi juga meningkatkan kepercayaan investor terhadap komitmen perusahaan dalam menjalankan bisnis secara etis (Mukhsin & Herawati, 2022).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa GCG berpengaruh besar terhadap penghindaran pajak di perusahaan berbasis syariah. Misalnya, Wibowo et al. (2024) menemukan bahwa keberadaan komite audit dan independensi dewan komisaris dapat mengurangi praktik penghindaran pajak di perusahaan yang mengikuti prinsip syariah. Selain itu, Gunawan dan Wahyudi (2019) menjelaskan bahwa struktur tata kelola yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai pengendalian internal, tetapi juga membantu mengatasi konflik kepentingan yang bisa memicu manipulasi pajak. Oleh karena itu, penerapan GCG yang konsisten dan menyeluruh menjadi langkah penting untuk mendukung keberlanjutan operasional perusahaan

syariah di JII sekaligus menjaga integritasnya dalam menghadapi tantangan perpajakan.

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan adalah Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Leverage. Dewan Komisaris Syariah memiliki peran penting dalam memastikan perusahaan mematuhi prinsip syariah, termasuk transparansi, keadilan, dan pengelolaan pajak sesuai dengan aturan hukum serta nilai-nilai Islam (Gunawan & Wahyudi, 2019). Hal ini penting karena pengelolaan pajak yang tidak sesuai bisa melanggar prinsip syariah dan merusak kepercayaan para pemangku kepentingan.

Selain itu, Komite Audit yang independen juga berperan besar dalam menjaga keandalan laporan keuangan. Komite ini bertugas mengawasi proses pelaporan keuangan perusahaan untuk memastikan tidak ada pelanggaran aturan perpajakan, seperti penghindaran pajak, yang dapat merugikan kredibilitas dan reputasi perusahaan di mata otoritas pajak dan masyarakat (Mukhsin & Herawati, 2022). Dengan pengawasan yang baik, Komite Audit membantu perusahaan tetap patuh pada hukum dan etika, sekaligus mengurangi risiko akibat praktik yang tidak sesuai dengan peraturan.

Profitabilitas perusahaan menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba, yang sering menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan terkait penghindaran pajak. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi biasanya memiliki lebih banyak sumber daya untuk memanfaatkan berbagai peluang perpajakan, seperti penggunaan insentif pajak atau pengaturan struktur

pajak yang lebih menguntungkan untuk mengurangi beban pajak. Cara lain yang dapat dilakukan termasuk memanfaatkan potongan pajak, strategi penghindaran pajak melalui transfer pricing, atau mekanisme pengelolaan pajak lain yang sesuai dengan peraturan namun tetap dapat mengurangi kewajiban pajak perusahaan (Putri & Halmawati, 2023).

Leverage perusahaan menunjukkan seberapa besar ketergantungan perusahaan pada pemberian eksternal, seperti utang. Semakin tinggi leverage, semakin besar insentif perusahaan untuk menghindari pajak, karena utang memberikan keuntungan berupa pengurangan pajak dari bunga yang dibayarkan. Leverage yang tinggi sering kali menimbulkan tekanan keuangan, sehingga mendorong perusahaan mencari cara pengelolaan pajak yang lebih efisien untuk mengurangi beban pajak yang bisa memengaruhi arus kas dan ketebalan keuangan perusahaan (Hanum, Gusmiarni, & Suratman, 2024). Oleh karena itu, perusahaan dengan profitabilitas dan leverage tinggi cenderung lebih aktif dalam penghindaran pajak guna mengoptimalkan keuntungan finansial dan menjaga kesehatan keuangan mereka.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hasil yang beragam mengenai hubungan antara Good Corporate Governance (GCG), profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Wibowo et al., (2024) menemukan bahwa profitabilitas dan tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi dan tata kelola yang baik lebih berisiko terlibat dalam praktik penghindaran pajak untuk memaksimalkan laba. Sementara itu, penelitian Mary et al., (2019) mengungkapkan

bahwa pengaruh independensi Dewan Komisaris terhadap penghindaran pajak bersifat moderat. Artinya, meskipun Dewan Komisaris berperan penting dalam pengawasan, pengaruhnya terhadap keputusan penghindaran pajak tidak selalu langsung dan bisa dipengaruhi oleh faktor lain, seperti komite audit atau struktur kepemilikan perusahaan.

Hasil penelitian yang beragam menunjukkan perlunya analisis lebih mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi penghindaran pajak, terutama pada perusahaan yang menerapkan prinsip syariah. Pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII), faktor-faktor tersebut mungkin berbeda dengan perusahaan konvensional. Hal ini karena perusahaan di JII tidak hanya mempertimbangkan faktor ekonomi dan keuangan dalam pengambilan keputusan, tetapi juga harus mematuhi prinsip syariah yang dapat memengaruhi kebijakan pajaknya. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut untuk menganalisis pengaruh GCG, profitabilitas, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan syariah, agar dapat memahami faktor-faktor tersebut dengan lebih baik.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Yang Tercatat di Jakarta Islamic Index Periode Tahun 2020-2024”**

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian mengenai pengaruh Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Leverage terhadap tax avoidance menunjukkan hasil yang tidak konsisten. Beberapa penelitian menemukan bahwa keberadaan Dewan Komisaris Syariah dapat mengurangi penghindaran pajak, sementara yang lain menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara kedua variabel tersebut. Begitu pula dengan pengaruh Komite Audit dan Kepemilikan Institusional yang terkadang dianggap sebagai faktor yang memperburuk penghindaran pajak, namun di sisi lain juga ada penelitian yang menunjukkan peran mereka dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Faktor profitabilitas dan leverage juga menunjukkan hasil yang bervariasi, di mana perusahaan dengan profitabilitas tinggi dan leverage yang besar mungkin lebih terdorong untuk melakukan tax avoidance.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Dewan Komisaris Syariah berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) periode Tahun 2020-2024?
2. Apakah Komite Audit berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) periode Tahun 2020-2024?
3. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) periode Tahun 2020-2024?

4. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) periode Tahun 2020-2024?
5. Apakah Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) periode Tahun 2020-2024?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan penelitian diatas, maka tujuan dari permasalahan ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah Dewan Komisaris Syariah berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) periode Tahun 2020-2024.
2. Untuk mengetahui apakah Komite Audit berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) periode Tahun 2020-2024.
3. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) periode Tahun 2020-2024.
4. Untuk mengetahui apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) periode Tahun 2020-2024.
5. Untuk mengetahui apakah Leverage berpengaruh terhadap tax avoidance pada perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) periode Tahun 2020-2024.

1.4. Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan dan tujuan penelitian di atas, maka cakupan atau batasan penelitian yang dapat penulis jabarkan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini terbatas pada perusahaan-perusahaan yang tercatat dalam Jakarta Islamic Index (JII) selama periode Tahun 2020-2024.
2. Penelitian ini berfokus pada variabel-variabel yang mempengaruhi tax avoidance, yaitu Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Leverage.
3. Penelitian ini tidak membahas variabel eksternal lainnya yang mungkin mempengaruhi praktik penghindaran pajak, seperti kebijakan perpajakan yang berlaku di Indonesia atau faktor makroekonomi lainnya.

1.5. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi pengembangan teori, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tax avoidance, khususnya dalam konteks perusahaan yang beroperasi sesuai prinsip syariah yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII).
 - b. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut mengenai tax avoidance dengan memperluas ruang lingkup variabel yang diuji, serta memberikan pandangan baru dalam teori tata kelola perusahaan syariah

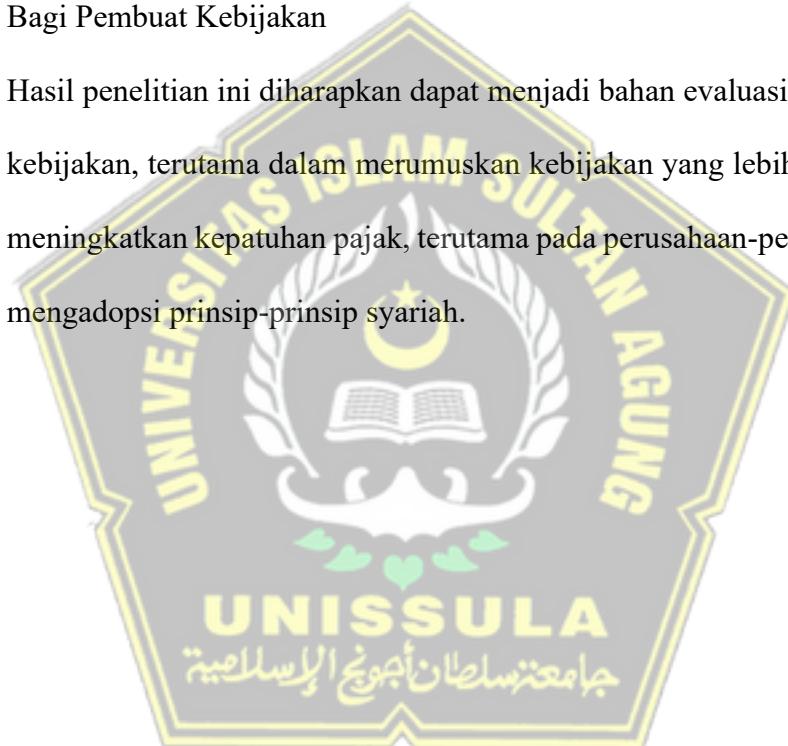
2. Secara Praktek

a. Bagi Manajemen Perusahaan

Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi manajemen perusahaan yang tercatat di Jakarta Islamic Index (JII) mengenai bagaimana meningkatkan penerapan good corporate governance (GCG) untuk meminimalkan praktik tax avoidance.

b. Bagi Pembuat Kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan, terutama dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kepatuhan pajak, terutama pada perusahaan-perusahaan yang mengadopsi prinsip-prinsip syariah.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan berfokus pada hubungan antara pihak yang memiliki perusahaan (prinsipal) dan pihak yang menjalankan perusahaan (agen). Dalam konteks perusahaan syariah, teori ini berperan penting untuk memahami interaksi antara pemegang saham dan manajer, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang mengatur tata kelola perusahaan. Teori ini menjelaskan bagaimana konflik kepentingan dapat muncul ketika manajer (agen) bertindak tidak sesuai dengan kepentingan pemegang saham (prinsipal) yang menginginkan kinerja perusahaan yang optimal sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik dalam perusahaan syariah sangat dipengaruhi oleh penerapan corporate governance (CG) yang berlandaskan pada prinsip syariah (Salim & Suyono, 2021).

Dalam perusahaan syariah, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam tata kelola perusahaan menjadi sangat penting untuk meminimalisir praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Prinsip keagenan dalam perusahaan syariah juga menuntut transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan dalam pengambilan keputusan. Salah satu cara untuk meningkatkan kinerja dan mengurangi kemungkinan terjadinya moral hazard adalah dengan memperkuat struktur corporate governance, yang meliputi pengawasan oleh dewan

syariah, komite audit, serta pengelolaan yang sesuai dengan standar syariah (Gunawan & Wahyudi, 2019).

Penerapan teori keagenan di perusahaan syariah juga mencakup peran penting bagi dewan komisaris dan manajemen dalam menciptakan kebijakan yang mendukung tujuan jangka panjang perusahaan tanpa mengabaikan aspek keberlanjutan dan kesejahteraan umat. Hal ini diharapkan dapat mengurangi praktik tax avoidance yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Risqiyah & Pramuka, 2021). Dalam hal ini, pengawasan yang ketat oleh dewan syariah dan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik menjadi aspek krusial dalam memitigasi risiko-risiko yang tidak sesuai dengan nilai-nilai syariah yang ditetapkan oleh perusahaan.

2.2. Variabel Penelitian

2.2.1. Partisipasi Dewan Komisaris Syariah

Dewan Komisaris Syariah adalah badan pengawas yang bertugas untuk memastikan kegiatan operasional lembaga keuangan syariah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Wibowo, Mukhibad, dan Anita (2024), peran Dewan Komisaris Syariah sangat penting dalam menjaga kepatuhan syariah dalam aktivitas bisnis, khususnya dalam menghindari praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

Risqiyah dan Pramuka (2021) menjelaskan bahwa Dewan Komisaris Syariah berfungsi memberikan arahan serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan yang diterapkan dalam lembaga keuangan syariah. Hal ini mencakup

pengawasan terhadap produk dan layanan keuangan untuk memastikan kesesuaiannya dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan syariah.

Gunawan dan Wahyudi (2019) menambahkan bahwa Dewan Komisaris Syariah juga bertugas memberikan rekomendasi terhadap tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, peran mereka melibatkan evaluasi berkala terhadap laporan kepatuhan syariah yang dibuat oleh manajemen perusahaan.

Menurut Mukhsin dan Herawati (2022), keberadaan Dewan Komisaris Syariah menjadi indikator utama dalam penerapan Islamic Corporate Governance. Dengan kata lain, mereka berperan sebagai pengawas independen yang memastikan semua kebijakan strategis perusahaan tetap dalam koridor syariah.

Dalam praktiknya, Dewan Komisaris Syariah memiliki wewenang untuk memberikan keputusan akhir dalam permasalahan terkait kepatuhan syariah. Hal ini sesuai dengan pernyataan Hanum, Gusmiarni, dan Suratman (2024) yang menyebutkan bahwa fungsi Dewan Komisaris Syariah tidak hanya sebagai pengawas, tetapi juga sebagai penasehat strategis yang memberikan panduan dalam pengambilan keputusan manajerial.

Dengan demikian, Dewan Komisaris Syariah berperan penting dalam menjaga integritas dan reputasi lembaga keuangan syariah melalui penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang sesuai dengan ajaran Islam.

2.2.2. Komite Audit

Komite Audit adalah sebuah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan perusahaan,

khususnya terkait transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Menurut Rahman dan Setiawan (2023), Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa proses audit internal maupun eksternal dilakukan secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Menurut Ningsih dan Supriyadi (2020), peran utama Komite Audit meliputi pengawasan terhadap laporan keuangan, pengendalian internal, serta evaluasi risiko perusahaan. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, Komite Audit juga bertugas memantau pelaksanaan operasional agar tetap selaras dengan prinsip syariah, berkoordinasi dengan Dewan Komisaris Syariah jika diperlukan.

Sementara itu, Widodo dan Kurniawan (2022) menekankan bahwa Komite Audit memainkan peran penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap laporan keuangan perusahaan. Hal ini dicapai melalui pemeriksaan terhadap kinerja auditor eksternal dan memastikan bahwa laporan keuangan mencerminkan kondisi sebenarnya dari perusahaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 juga mengatur bahwa Komite Audit harus terdiri dari anggota yang independen dan memiliki kompetensi di bidang akuntansi dan/atau keuangan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa Komite Audit dapat menjalankan tugasnya secara objektif tanpa adanya konflik kepentingan.

Komite Audit juga bertanggung jawab untuk menilai efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan. Hal ini termasuk memastikan bahwa prosedur yang diterapkan dapat mencegah kecurangan atau penyimpangan keuangan.

Menurut Hasan dan Nuraini (2021), Komite Audit memiliki kewajiban untuk memberikan rekomendasi perbaikan kepada manajemen jika ditemukan kelemahan dalam sistem pengendalian internal.

Dengan demikian, Komite Audit memegang peran strategis dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, dan integritas laporan keuangan perusahaan, serta mendukung tata kelola yang baik untuk menjaga kepercayaan pemangku kepentingan.

2.2.3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh lembaga atau institusi seperti bank, perusahaan asuransi, reksa dana, atau lembaga keuangan lainnya. Menurut Putra dan Nugroho (2022), kepemilikan ini penting dalam tata kelola perusahaan karena dapat membantu mengawasi kinerja manajemen dan mengambil keputusan yang lebih bijaksana.

Rahmawati dan Sari (2021) menyebutkan bahwa lembaga yang memiliki saham dalam jumlah besar biasanya lebih aktif mengawasi jalannya perusahaan. Hal ini membantu memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik dan kepentingan pemegang saham terjaga.

Teori keagenan juga menyatakan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi konflik antara pemilik saham dan manajemen perusahaan. Lembaga ini biasanya memiliki pengalaman dan sumber daya untuk memastikan perusahaan berjalan secara efisien (Jensen dan Meckling, 1976).

Kepemilikan institusional juga membantu menstabilkan harga saham perusahaan. Widjaja dan Pratama (2020) menjelaskan bahwa perusahaan dengan

kepemilikan institusional yang besar cenderung memiliki harga saham yang lebih stabil karena keputusan investasi mereka berdasarkan analisis yang matang.

Di Indonesia, kepemilikan institusional diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Lembaga-lembaga yang memiliki saham perusahaan diwajibkan melaporkan kepemilikannya secara terbuka untuk menjaga transparansi dan melindungi kepentingan publik.

Secara umum, kepemilikan institusional membantu perusahaan tetap stabil dan tumbuh dengan cara memberikan modal dan pengawasan yang lebih baik.

2.2.4. Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dalam periode tertentu. Menurut Kasmir (2021), profitabilitas mencerminkan sejauh mana perusahaan dapat mengelola sumber dayanya secara efektif untuk menghasilkan laba. Dengan kata lain, profitabilitas menjadi ukuran keberhasilan perusahaan dalam menjalankan operasinya.

Laba yang diperoleh perusahaan sangat penting karena menjadi indikator kinerja keuangan perusahaan. Putri dan Santoso (2020) menjelaskan bahwa profitabilitas sering diukur menggunakan rasio keuangan seperti Return on Assets (ROA), Return on Equity (ROE), dan Net Profit Margin (NPM). Rasio ini membantu pemilik perusahaan, investor, dan kreditor dalam mengevaluasi seberapa baik perusahaan menghasilkan keuntungan.

Menurut Sudirman dan Lestari (2019), profitabilitas juga memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Perusahaan yang memiliki tingkat

profitabilitas tinggi cenderung memiliki daya saing yang lebih baik dan kemampuan untuk berinvestasi di masa depan.

Faktor-faktor yang memengaruhi profitabilitas antara lain adalah efisiensi operasional, strategi pemasaran, kualitas produk, serta kemampuan manajemen dalam mengelola sumber daya. Selain itu, kondisi ekonomi makro seperti tingkat inflasi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah juga turut memengaruhi profitabilitas perusahaan.

Secara keseluruhan, profitabilitas merupakan salah satu indikator penting yang menunjukkan kesehatan finansial perusahaan. Tingkat profitabilitas yang tinggi tidak hanya memberikan keuntungan bagi perusahaan tetapi juga memberikan kepercayaan kepada para pemangku kepentingan.

2.2.5. Leverage

Leverage dalam keuangan berarti menggunakan berbagai sumber daya atau instrumen keuangan yang dimiliki perusahaan untuk meningkatkan potensi keuntungan investasi. Leverage sering kali diukur dengan rasio utang terhadap ekuitas atau rasio utang terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan sejauh mana perusahaan mengandalkan utang untuk mendanai operasinya.

Leverage dapat mempengaruhi keputusan penghindaran pajak perusahaan. Perusahaan dengan tingkat leverage tinggi biasanya memiliki kewajiban bunga yang besar, yang bisa dikurangkan dari pajak. Hal ini mengurangi penghasilan yang dikenakan pajak, yang pada gilirannya mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Wibowo et al., 2024). Oleh karena itu, leverage menjadi variabel yang penting dalam melihat hubungan antara struktur modal dan penghindaran pajak.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa leverage memengaruhi penghindaran pajak di berbagai sektor industri. Sebagai contoh, Setiawan & Al-Ahsan (2018) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat leverage tinggi cenderung lebih agresif dalam penghindaran pajak karena mereka lebih bergantung pada utang untuk menjalankan operasionalnya. Ini berkaitan dengan kemampuannya untuk mengurangi pajak melalui pengurangan kewajiban bunga utang.

Leverage juga dapat berinteraksi dengan faktor lain seperti profitabilitas dan tata kelola perusahaan dalam mempengaruhi strategi penghindaran pajak. Misalnya, perusahaan dengan leverage tinggi namun profitabilitas rendah mungkin akan lebih terdorong untuk mengatur struktur pajaknya agar bisa meningkatkan laba bersih setelah pajak (Hanum et al., 2024).

Secara keseluruhan, leverage adalah faktor penting dalam pengelolaan pajak yang efektif, baik untuk meminimalkan kewajiban pajak yang harus dibayar maupun dalam mengelola struktur modal perusahaan agar mencapai tujuan keuangan jangka panjang (Tanjung & Amin, 2022).

2.2.6. Tax Avoidance

Tax avoidance atau penghindaran pajak adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau perusahaan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan cara yang sah sesuai hukum. Ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kekosongan dalam peraturan pajak untuk mengurangi kewajiban pajak. Berbeda dengan tax evasion (penggelapan pajak) yang ilegal, tax avoidance dilakukan dengan cara yang masih diperbolehkan oleh undang-undang.

Menurut Wibowo, Mukhibad, dan Anita (2024), tax avoidance terjadi ketika perusahaan atau individu merencanakan pajak secara cermat untuk mengurangi kewajiban pajaknya. Mereka menggunakan strategi yang diizinkan oleh undang-undang, seperti memindahkan pendapatan, memanfaatkan insentif pajak, atau mengatur struktur keuangan perusahaan, yang semuanya sah secara hukum, namun dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.

Risqiyah dan Pramuka (2021) menjelaskan bahwa penghindaran pajak sering dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perusahaan tanpa melanggar aturan pajak. Hal ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, seperti pengaturan transfer pricing atau menggunakan struktur perusahaan yang lebih efisien dari segi pajak.

Meskipun tax avoidance sah secara hukum, praktik ini sering menjadi perdebatan etis karena banyak orang merasa perusahaan atau individu seharusnya memberikan kontribusi yang lebih besar melalui pajak untuk kemajuan negara. Gunawan dan Wahyudi (2019) mengungkapkan bahwa meskipun tax avoidance diperbolehkan, strategi ini harus dipertimbangkan dengan hati-hati agar tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Secara umum, tax avoidance adalah cara yang sah untuk mengurangi kewajiban pajak, namun harus dilakukan dengan bijak agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat.

2.3. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai penghindaran pajak (tax avoidance) telah banyak dilakukan dalam berbagai konteks, baik itu di sektor korporasi maupun individu. Berbagai faktor yang mempengaruhi tax avoidance, baik dari sisi kebijakan perpajakan, karakteristik perusahaan, hingga strategi perusahaan dalam mengelola pajak, menjadi fokus utama dalam penelitian-penelitian tersebut. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	Wibowo, M. B. A., Mukhibad, H., & Anita, N. (2024)	Pengaruh Profitabilitas dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance	Profitabilitas, Corporate Governance	Profitabilitas dan corporate governance berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang diteliti.
2	Risqiyah, M. F., & Pramuka, B. A. (2021)	Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Bank Umum Syariah di Indonesia	Islamic Corporate Governance, Tax Avoidance	Islamic corporate governance berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada bank syariah di Indonesia.
3	Gunawan, M. I., & Wahyudi, I. (2019)	Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2017	Good Corporate Governance, Tax Avoidance	Penerapan good corporate governance berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perbankan syariah di Indonesia.
4	Putri, W. A., & Halmawati, H. (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan Terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Perusahaan	Profitabilitas, Leverage, Corporate Governance, Tax Avoidance	Profitabilitas, leverage, dan corporate governance berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Pertambangan yang Terdaftar di BEI		pada perusahaan pertambangan.
5	Mukhsin, M., & Herawati, M. (2022)	Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII)	Good Corporate Governance, Tax Avoidance	Good corporate governance memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index.
6	Hanum, K., Gusmiarni, G., & Suratman, A. (2024)	Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran KAP sebagai Pemoderasi	Good Corporate Governance, Leverage, Sales Growth, KAP Size, Tax Avoidance	Good corporate governance, leverage, dan sales growth berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan ukuran KAP sebagai variabel pemoderasi.
7	Mary, H., Pratiwi, N., & Agtisen, S. D. (2019)	Pengaruh Tenure Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance	Tenure Komisaris, Independensi Komisaris, Kepemilikan Institusional, Tax Avoidance	Tenure dewan komisaris, independensi dewan komisaris, dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
8	Amin, K., & Suyono, N. A. (2020)	Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2016 Sampai 2018)	Corporate Governance, Tax Avoidance	Corporate governance berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
9	Manita, Y. D., Samsiah, S., & Azhari, I. P. (2022)	Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak	Corporate Governance, Profitabilitas	Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
10	Resita, A. D., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2021)	Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2019)	Good Corporate Governance, Leverage, Tax Avoidance	Good corporate governance dan leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perbankan syariah di Indonesia.
11	Purwaningsih, E., & Prasetyo, F. B.	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Komite Audit, Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance	Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan	Leverage dan Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance.
12	Tanjung, M. R., & Amin, M. N. (2022)	Pengaruh leverage, corporate governance dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor keuangan sub sektor perbankan periode 2017-2021	Leverage, Corporate Governance, Profitabilitas	Leverage dan Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
13	Utami, A. A. Y. (2023)	Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak	Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial	Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.
14	Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap	Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen	Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018		
15	Chintia, V., & Susanto, Y. K. (2022)	Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance	Corporate Governance	Corporate Governance berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.
16	Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019)	Pengaruh thin capitalization dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi	Thin Capitalization, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional	Kepemilikan Institusional memoderasi pengaruh Thin Capitalization terhadap Tax Avoidance.
17	Kinasih, R. F. A., Maslichah, M., & Sudaryanti, D. (2021)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Strategi Bisnis, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak	Tata Kelola Perusahaan, Leverage, Profitabilitas	Strategi Bisnis berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
18	Prihandini, D. A., & Mujiyati, M. (2024)	Pengaruh Return on assets (ROA), Leverage dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak	ROA, Corporate Governance, Leverage	Corporate Governance dan Leverage berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.
19	Putri, W. A., & Halmawati, H. (2023)	Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Profitabilitas, Leverage, Tata Kelola Perusahaan	Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap Tax Avoidance.
20	Mardania, D., Abbas, D. S., &	Pengaruh Good Corporate Governance,	GCG, Profitabilitas, Leverage	GCG dan Profitabilitas berpengaruh

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Hakim, M. Z. (2024)	Profitabilitas, Leverage dan Fixed Asset Intensity terhadap Tax Avoidance		signifikan terhadap Tax Avoidance.

Sumber: Dicarikan dari berbagai sumber, penelitian 2024

2.4. Hipotesis Penelitian

2.4.1. Pengaruh Dewan Komisaris Syariah terhadap Tax Avoidance

Dewan Komisaris Syariah memiliki peran signifikan dalam memastikan kepatuhan perusahaan terhadap prinsip-prinsip syariah, termasuk aspek tata kelola perusahaan dan pelaporan keuangan yang transparan. Sebagai bagian dari mekanisme pengawasan, Dewan Komisaris Syariah tidak hanya memantau tetapi juga memberikan arahan strategis untuk memastikan perusahaan menjalankan praktik bisnis yang etis dan bertanggung jawab, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Tax avoidance, dalam batasan legal, dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak. Namun, praktik ini berpotensi menjadi lebih terarah dan terkontrol dengan adanya pengawasan Dewan Komisaris Syariah. Pengawasan ini mendorong perusahaan untuk mengelola strategi perpajakan yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah dan menjaga reputasi perusahaan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan peran positif Dewan Komisaris Syariah dalam meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. Menurut Wibowo, Mukhibad, dan Anita (2024), penerapan tata kelola berbasis syariah berkontribusi pada pengelolaan pajak yang lebih transparan dan berkeadilan. Gunawan dan

Wahyudi (2019) juga menemukan bahwa perusahaan dengan pengawasan syariah menunjukkan kepatuhan lebih tinggi terhadap regulasi pajak. Selain itu, Risqiyah dan Pramuka (2021) mengungkapkan bahwa Islamic Corporate Governance mampu meminimalkan risiko terkait praktik perpajakan yang kontroversial.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H1: Dewan Komisaris Syariah berpengaruh positif terhadap pengelolaan tax avoidance

2.4.2. Pengaruh Komite Audit terhadap Tax Avoidance

Komite audit merupakan salah satu elemen penting dalam mekanisme tata kelola perusahaan (corporate governance) yang memiliki peran mengawasi dan memastikan bahwa laporan keuangan perusahaan disajikan secara transparan dan akurat. Peran ini dianggap dapat memengaruhi tingkat tax avoidance yang dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, keberadaan komite audit yang efektif diharapkan dapat meningkatkan pengelolaan pajak perusahaan secara strategis, termasuk dalam upaya optimalisasi tax avoidance sesuai regulasi yang berlaku.

Penelitian sebelumnya menunjukkan hubungan antara komite audit dan tax avoidance. Wibowo, Mukhibad, dan Anita (2024) menemukan bahwa komite audit yang berfungsi dengan baik mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan sehingga memengaruhi strategi pengelolaan pajak. Penelitian lain oleh Risqiyah dan Pramuka (2021) juga mengungkapkan bahwa penerapan Islamic corporate governance, termasuk keberadaan komite audit, memiliki pengaruh signifikan terhadap pengelolaan pajak di bank syariah.

Selain itu, Gunawan dan Wahyudi (2019) dalam studinya pada perbankan syariah di Indonesia menegaskan bahwa penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk pengawasan komite audit, dapat membantu perusahaan dalam mengoptimalkan strategi pajaknya. Penelitian ini didukung oleh Setiawan dan Al-Ahsan (2018) yang menunjukkan bahwa keberadaan komite audit yang efektif berkontribusi terhadap pengelolaan pajak yang lebih strategis melalui pengawasan yang lebih ketat terhadap laporan keuangan.

Penelitian lainnya, seperti yang dilakukan oleh Purwaningsih dan Prasetyo, mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit yang kompeten dan independen mampu membantu perusahaan dalam mencapai strategi pengelolaan pajak yang efektif dengan memastikan kepatuhan terhadap aturan perpajakan. Hal ini diperkuat oleh temuan Utami (2023), yang menyebutkan bahwa keberadaan komite audit dengan proporsi independensi yang tinggi berdampak signifikan terhadap optimalisasi tax avoidance di perusahaan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H2: Komite audit memiliki pengaruh positif terhadap tax avoidance.

2.4.3. Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance

Kepemilikan institusional mengacu pada proporsi saham yang dimiliki oleh lembaga atau badan yang memiliki kepentingan finansial jangka panjang dalam perusahaan. Pemegang saham institusional, seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, atau bank, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan strategis perusahaan, termasuk dalam hal pengelolaan pajak. Secara

umum, kepemilikan institusional dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam tata kelola perusahaan, sehingga mempengaruhi praktik perpajakan yang dijalankan oleh perusahaan.

Tax avoidance, meskipun legal, dapat menjadi alat bagi perusahaan untuk mengoptimalkan kewajiban pajaknya, namun praktik ini sering kali memunculkan kontroversi terkait kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang ada. Dalam konteks ini, pemegang saham institusional berperan dalam mengawasi dan mengarahkan manajemen perusahaan untuk menjalankan praktik pajak yang efisien namun tetap mematuhi hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan tax avoidance yang berisiko merugikan citra perusahaan dan menghindari sanksi dari otoritas pajak.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak yang lebih transparan dan sesuai dengan peraturan. Menurut Mary, Pratiwi, dan Agtisen (2019), perusahaan dengan tingkat kepemilikan institusional yang tinggi cenderung memiliki praktik pajak yang lebih baik karena pemegang saham institusional memberikan tekanan yang kuat pada manajemen untuk mengikuti standar akuntansi yang lebih ketat. Hal serupa ditemukan oleh Sari, Luthan, dan Syafriyeni (2020) yang menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dapat mengurangi perilaku tax avoidance yang berisiko tinggi, karena pengawasan yang lebih intensif terhadap kebijakan pajak perusahaan. Fauzan, Arsanti, dan Fatchan (2021) juga menemukan bahwa perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional yang tinggi lebih cenderung

mengelola pajak mereka dengan hati-hati untuk menghindari potensi masalah hukum yang dapat muncul akibat penghindaran pajak yang berlebihan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H3: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengelolaan tax avoidance.

2.4.4. Pengaruh Profitabilitas terhadap Tax Avoidance

Profitabilitas perusahaan, yang diukur dengan rasio laba, sering dianggap sebagai faktor penting dalam pengambilan keputusan manajerial, termasuk strategi pajak. Beberapa penelitian menunjukkan hubungan positif antara profitabilitas dan penghindaran pajak (tax avoidance), di mana perusahaan yang lebih menguntungkan cenderung memiliki insentif untuk memanfaatkan celah hukum dalam sistem pajak untuk mengurangi beban pajak yang mereka bayar. Dalam konteks ini, profitabilitas dapat mendorong manajer untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih agresif untuk meningkatkan laba setelah pajak.

Menurut Wibowo, Mukhibad, & Anita (2024), perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki lebih banyak sumber daya dan kapasitas untuk melakukan perencanaan pajak yang lebih kompleks. Mereka dapat memanfaatkan struktur pajak yang lebih efisien, mengurangi pengeluaran pajak, dan mengoptimalkan pendapatan setelah pajak. Hasil serupa juga ditemukan oleh Risqiyah & Pramuka (2021) yang menyatakan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi lebih cenderung terlibat dalam penghindaran pajak karena

mereka memiliki insentif finansial yang lebih besar untuk memanfaatkan peluang tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh Gunawan & Wahyudi (2019) juga menemukan bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang baik lebih berisiko melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Dalam hal ini, profitabilitas berfungsi sebagai pendorong utama dalam strategi penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajer perusahaan. Oleh karena itu, dapat diajukan hipotesis sebagai berikut:

Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Profitabilitas berpengaruh positif terhadap tax avoidance

2.4.5. Pengaruh Leverage terhadap Tax Avoidance

Leverage merupakan rasio yang menggambarkan sejauh mana perusahaan menggunakan utang dalam struktur modalnya. Dalam konteks penghindaran pajak (tax avoidance), leverage sering dikaitkan dengan pengurangan beban pajak melalui biaya bunga atas utang, yang dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak. Secara teori, semakin tinggi tingkat leverage, semakin besar potensi pengurangan pajak melalui pengurangan bunga, sehingga memungkinkan perusahaan melakukan penghindaran pajak.

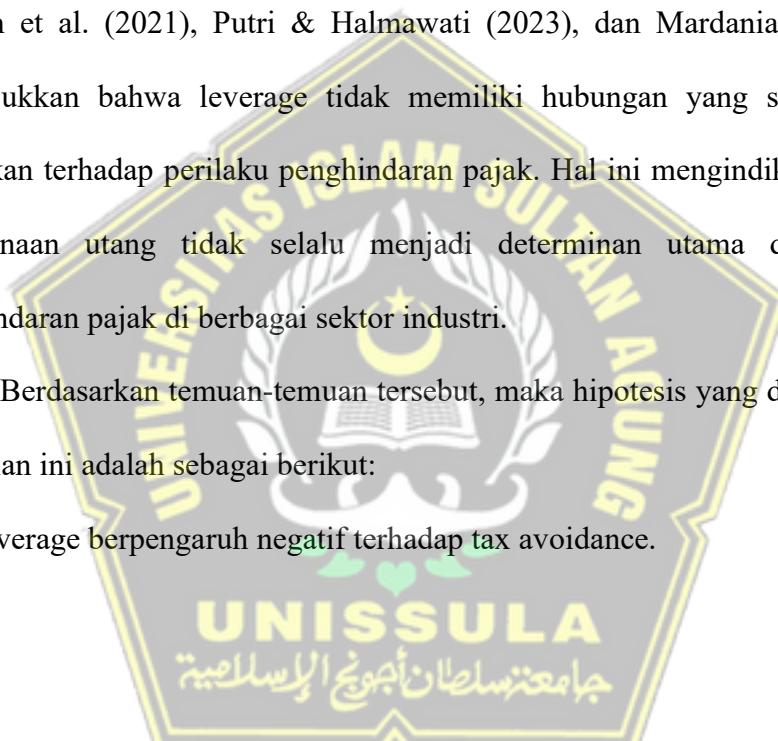
Namun demikian, temuan empiris mengenai pengaruh leverage terhadap tax avoidance menunjukkan hasil yang bervariasi. Prihandini dan Mujiyati (2024) menemukan bahwa leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance, yang berarti bahwa semakin tinggi tingkat leverage, semakin rendah kecenderungan

perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan dengan utang yang tinggi justru lebih diawasi oleh kreditor dan otoritas pajak, sehingga menurunkan peluang untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif.

Sementara itu, beberapa penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh leverage terhadap tax avoidance tidak signifikan. Penelitian oleh Sari et al. (2020), Kinasih et al. (2021), Putri & Halmawati (2023), dan Mardania et al. (2024) menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki hubungan yang secara statistik signifikan terhadap perilaku penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa penggunaan utang tidak selalu menjadi determinan utama dalam praktik penghindaran pajak di berbagai sektor industri.

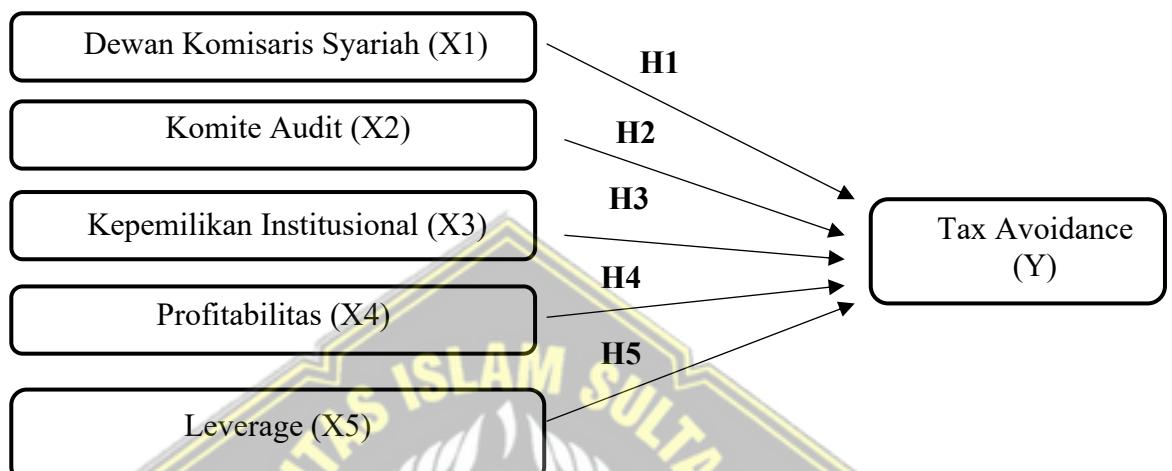
Berdasarkan temuan-temuan tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H5: Leverage berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

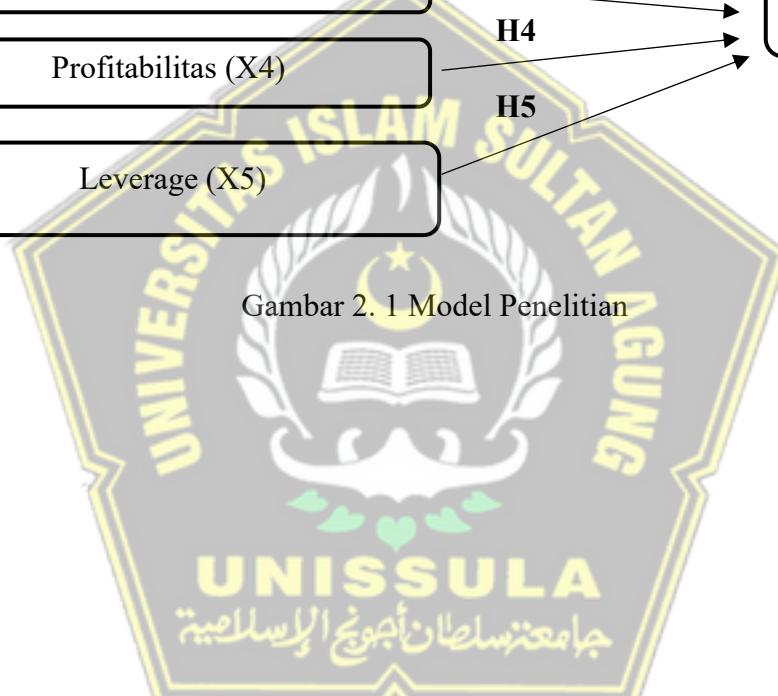


2.5. Model Penelitian

Penelitian ini menggunakan 5 variabel bebas Independen (Y) dan 1 variabel terikat dependen (Y)



Gambar 2. 1 Model Penelitian



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian explanatori. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel menggunakan data numerik yang dianalisis dengan alat statistik (Sugiyono, 2019). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ingin menguji pengaruh Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode Tahun 2020-2024.

Selain itu, penelitian ini juga bersifat deskriptif dan verifikatif. Deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi yang ada mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance, sedangkan verifikatif digunakan untuk menguji kebenaran hubungan antar variabel yang diteliti (Sekaran & Bougie, 2016). Dengan demikian, pendekatan kuantitatif yang digunakan sesuai untuk mengukur pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap praktik tax avoidance.

3.2. Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) periode Tahun 2020-2024. Populasi penelitian ini terdiri dari seluruh perusahaan yang tercatat di JII pada periode tersebut. Jakarta Islamic Index merupakan indeks saham yang berisi perusahaan-perusahaan yang memenuhi

kriteria syariah, yang memiliki karakteristik khusus terkait dengan prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya.

Sampel penelitian ini dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan penelitian (Sugiyono, 2016). Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang terdaftar di JII pada periode Tahun 2020-2024.
2. Perusahaan yang memiliki laporan keuangan yang lengkap dan dapat diakses untuk periode yang ditentukan.
3. Perusahaan yang memiliki informasi yang cukup terkait dengan variabel yang diteliti, yaitu Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage, dan Tax Avoidance.

Setelah kriteria di atas diterapkan, jumlah sampel yang memenuhi syarat adalah 20 perusahaan. Pengambilan sampel berdasarkan tahun dilakukan secara cross-sectional, dengan data yang diambil pada masing-masing tahun penelitian, yaitu 2020 hingga 2024.

3.3. Sumber dan Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode Tahun 2020-2024. Laporan tahunan ini berisi informasi mengenai Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage, serta data mengenai praktik penghindaran pajak (tax avoidance) yang dilakukan oleh perusahaan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumenter. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder melalui dokumentasi yang tersedia, yaitu laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII) pada periode 2020-2024. Laporan tahunan ini memuat informasi yang dibutuhkan mengenai Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, Leverage, serta data terkait praktik penghindaran pajak (tax avoidance). Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk mengetahui pengaruh variabel-variabel tersebut terhadap tax avoidance pada perusahaan yang bersangkutan.

3.5. Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

3.5.1. Variabel Dependen

Variabel dependen adalah variabel yang menjadi fokus utama penelitian dan dipengaruhi oleh variabel lain. Dalam penelitian ini, variabel dependen adalah Tax Avoidance. Tax avoidance mengacu pada upaya perusahaan untuk meminimalkan beban pajak tanpa melanggar aturan perpajakan.

3.5.2. Variabel Independen

Variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen. Dalam penelitian ini, terdapat lima variabel independen yaitu: Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Leverage.

3.5.3. Definisi Operasional

Definisi operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas dan spesifik terhadap variabel-variabel yang digunakan. Definisi operasional ini mengacu pada konsep-konsep yang telah dikembangkan oleh para ahli dan penelitian terdahulu, sebagaimana tercantum dalam referensi yang relevan.

1. Dewan Komisaris Syariah

Dewan Komisaris Syariah merupakan badan pengawas yang bertanggung jawab memastikan operasional perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh otoritas terkait (Mubarok, 2023; Amalia & Hidayat, 2021).

- a. Indikator
 - a) Proporsi Anggota Syariah (PAS)
 - b) Frekuensi Rapat Syariah
 - c) Jumlah Rekomendasi Syariah
- b. Rumus
 - a) Proporsi Anggota Syariah = $\frac{\text{Jumlah Anggota Syariah}}{\text{Total Anggota Komisaris}}$
 - b) Frekuensi Rapat Syariah = $\frac{\text{Jumlah Rapat Dewan Syariah dalam Satu Tahun}}{\text{Dewan Syariah}}$
 - c) Jumlah Rekomendasi Syariah = Total Rekomendasi yang Diberikan

2. Komite Audit

Komite yang mengawasi pelaporan keuangan, audit internal dan eksternal, serta kepatuhan terhadap regulasi (Hery, 2021).

a. Indikator

- a) Jumlah anggota komite audit (KOA)
- b) Frekuensi rapat komite audit
- c) Keberadaan laporan audit

b. Rumus

- a) Jumlah anggota komite audit: Total anggota dalam komite audit
- b) Frekuensi rapat komite audit: Jumlah rapat yang dilaksanakan dalam satu tahun
- c) Keberadaan laporan audit: Ada atau tidaknya laporan audit yang diterbitkan

3. Kepemilikan Institusional

Proporsi saham yang dimiliki oleh institusi seperti bank atau lembaga keuangan lainnya (Latief et al., 2023).

a. Indikator

- a) Persentase saham institusional (PSI)

b. Rumus

- a) Persentase saham institusional = $(\text{Saham yang dimiliki institusi} / \text{Total saham beredar}) \times 100\%$

4. Profitabilitas

Kemampuan perusahaan menghasilkan laba terkait dengan penjualan, aset, atau ekuitas (Pratama et al., 2023).

a. Indikator

- a) Return on Assets (ROA)
- b) Return on Equity (ROE)
- c) Net Profit Margin (NPM)

b. Rumus

- a) $ROA = (\text{Laba bersih} / \text{Total aset}) \times 100\%$
- b) $ROE = (\text{Laba bersih} / \text{Total ekuitas}) \times 100\%$
- c) $\text{Net Profit Margin} = (\text{Laba bersih} / \text{Penjualan bersih}) \times 100\%$

5. Leverage

Penggunaan utang untuk membiayai operasional atau ekspansi bisnis (Rahmawati et al., 2023).

a. Indikator

- a) Debt to Equity Ratio (DER)
- b) Debt to Asset Ratio (DAR)
- c) Long-term Debt to Total Capitalization (LDTC)

b. Rumus

- a) $DER = (\text{Total utang} / \text{Total ekuitas}) \times 100\%$
- b) $DAR = (\text{Total utang} / \text{Total aset}) \times 100\%$
- c) $\text{Long-term Debt to Total Capitalization} = (\text{Utang jangka panjang} / (\text{Utang jangka panjang} + \text{Ekuitas})) \times 100\%$

6. Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan beban pajak melalui pemanfaatan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan, tanpa melanggar hukum yang berlaku (Wibowo, Mukhibad, & Anita, 2024), (Hanum, Gusmiarni, & Suratman, 2024; Gunawan & Wahyudi, 2019).

a. Indikator

- a) Effective Tax Rate (ETR)
- b) Total Book-Tax Difference (BTD)

b. Rumus:

- a) $ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$
- b) $BTD = \text{Laba Akuntansi} - \text{Laba Fiskal}$

Profil

Tabel 3. 1 Variabel dan Indikator

No.	Variabel	Indikator	Sumber
1	Tax Avoidance (Y)	$ETR = \frac{\text{Total Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}} \times 100\%$	Wibowo et al., (2024)
2	Dewan Komisaris Syariah (X1)	$PAS = \frac{\text{Jumlah Anggota Syariah}}{\text{Total Anggota Komisaris}}$	Mubarok, 2023
3	Komite Audit (X2)	$KOA = \sum \text{Komite Audit}$	Hery, 2021
4	Kepemilikan Institusional (X3)	$PSI = \frac{\text{Saham yang dimiliki}}{\text{Total Saham Beredar}} \times 100\%$	Latief et al., 2023
5	Profitabilitas (X4)	$NPM = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Penjualan Bersih}} \times 100\%$	Pratama et al., 2023
6	Leverage (X5)	$LDTA = \frac{\text{Utang Jangka Panjang}}{(\text{Ekuitas} + \text{Utang Jangka Panjang})} \times 100\%$	Rahmawati et al., 2023

3.6. Metode Analisis Data

Pada bab ini, akan dijelaskan mengenai metode analisis data yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan software SPSS. Metode yang digunakan meliputi analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, serta uji signifikansi baik parsial maupun simultan. Berikut adalah uraian lengkap mengenai setiap metode analisis yang digunakan.

3.6.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data secara keseluruhan, seperti rata-rata, standar deviasi, minimum, maksimum, dan distribusi frekuensi. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran umum mengenai data yang digunakan dalam penelitian. Statistik deskriptif berguna dalam memahami karakteristik sampel serta mempermudah dalam melakukan interpretasi terhadap data yang diperoleh (Sekaran, 2016).

3.6.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan analisis regresi, perlu dilakukan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa data yang digunakan memenuhi asumsi-asumsi dasar dalam analisis regresi. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi:

3.6.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah data residual dari regresi terdistribusi secara normal. Uji ini dilakukan dengan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov atau Shapiro-Wilk, di mana hasil signifikansi lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa data terdistribusi normal (Hair et al., 2014).

3.6.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah varians error bersifat konstan. Uji ini dilakukan dengan menggunakan metode scatterplot dan uji Glejser. Jika titik-titik pada scatterplot tersebar acak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas (Gujarati, 2015).

3.6.2.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk memastikan bahwa tidak ada korelasi yang tinggi antar variabel independen. Pengujian ini menggunakan nilai Variance Inflation Factor (VIF) dengan nilai VIF lebih dari 10 menunjukkan adanya multikolinearitas yang tinggi (Ghozali, 2016).

3.6.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antar nilai residual yang berurutan. Uji ini dilakukan menggunakan uji Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson antara 1,5 hingga 2,5 menunjukkan tidak adanya masalah autokorelasi (Gujarati, 2015).

3.6.3. Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui hubungan antara satu variabel dependen dengan dua atau lebih variabel independen. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa faktor terhadap variabel yang menjadi fokus penelitian. Model regresi linear berganda yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \dots + \beta_n X_n + \varepsilon$$

di mana Y adalah variabel dependen, β_0 adalah konstanta, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ adalah koefisien regresi, dan ϵ adalah error term (Hair et al., 2014).

3.6.4. Uji Signifikansi Parameter Individual atau Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk menguji apakah koefisien regresi masing-masing variabel independen signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Uji ini dilakukan dengan melihat nilai t hitung dan membandingkannya dengan nilai t tabel pada tingkat signifikansi 5%. Jika nilai t hitung lebih besar dari t tabel, maka hipotesis bahwa koefisien regresi tersebut signifikan diterima (Sekaran, 2016).

3.6.5. Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menguji signifikansi secara simultan dari seluruh variabel independen dalam model regresi terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan nilai F tabel pada tingkat signifikansi 5%. Jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan model regresi signifikan (Gujarati, 2015).

3.6.6. Koefisien Determinasi (Uji R²)

Koefisien determinasi atau R² digunakan untuk mengukur sejauh mana variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen dalam model regresi. Nilai R² berkisar antara 0 dan 1, di mana semakin mendekati 1, semakin baik model regresi dalam menjelaskan variasi data (Ghozali, 2016).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII) selama periode tahun 2020 hingga 2024. Jakarta Islamic Index merupakan indeks saham syariah yang terdiri dari 30 perusahaan yang telah memenuhi kriteria syariah sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Indeks ini digunakan sebagai acuan bagi investor yang ingin berinvestasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar modal Indonesia.

Tabel 4. 1 Daftar Perusahaan yang terdaftar di JII

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ACES	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
2	ADMIR	PT Adaro Minerals Indonesia Tbk
3	ADRO	PT Adaro Energy Indonesia Tbk
4	AKRA	PT AKR Corporindo Tbk
5	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk
6	ASII	PT Astra International Tbk
7	BRIS	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
8	BRMS	PT Bumi Resources Minerals Tbk
9	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
10	EMTK	PT Elang Mahkota Teknologi Tbk
11	EXCL	PT XL Axiata Tbk
12	GOTO	PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk
13	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
14	INCO	PT Vale Indonesia Tbk
15	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
16	INKP	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
17	INTP	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
18	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
19	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk

No.	Kode	Nama Perusahaan
20	MAPI	PT Mitra Adiperkasa Tbk
21	MDKA	PT Merdeka Copper Gold Tbk
22	MIKA	PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk
23	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
24	PTBA	PT Bukit Asam Tbk
25	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
26	TLKM	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
27	TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
28	UNTR	PT United Tractors Tbk
29	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk
30	WIFI	PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge)

Sumber: JII 2025

Pemilihan sampel dilakukan menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria penentuan sampel dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut:

Tabel 4. 2 Kriteria Penentuan Sampel

Kriteria Penelitian	Jumlah
Terdaftar di JII periode 2020–2024	30
Memiliki laporan keuangan lengkap dan dapat diakses berturut-turut selama periode 2020-2024	24
Memiliki data lengkap terkait variabel: a. Dewan Komisaris Syariah b. Komite Audit c. Kepemilikan Institusional d. Profitabilitas e. Leverage f. Tax Avoidance	20
Data Observasi (5 Tahun)	100

Sumber: JII 2025

Berdasarkan kriteria tersebut, diperoleh sebanyak 20 perusahaan yang memenuhi seluruh persyaratan untuk dijadikan sampel penelitian. Dengan mempertimbangkan periode pengamatan selama lima tahun (2020–2024), maka total data observasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 observasi. Seluruh data yang digunakan diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) dan laporan keuangan yang telah diaudit, yang diakses melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) maupun situs resmi masing-masing perusahaan. Berikut adalah daftar perusahaan yang lolos kriteria sampel:

Tabel 4. 3 Daftar Perusahaan yang Memenuhi Kriteria

No.	Kode	Nama Perusahaan
1	ACES	PT Ace Hardware Indonesia Tbk
2	ADRO	PT Adaro Energy Indonesia Tbk
3	ANTM	PT Aneka Tambang Tbk
4	ASII	PT Astra International Tbk
5	BRIS	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
6	CPIN	PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk
7	EXCL	PT XL Axiata Tbk
8	ICBP	PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
9	INCO	PT Vale Indonesia Tbk
10	INDF	PT Indofood Sukses Makmur Tbk
11	INTP	PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk
12	ITMG	PT Indo Tambangraya Megah Tbk
13	KLBF	PT Kalbe Farma Tbk
14	PGAS	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
15	PTBA	PT Bukit Asam Tbk
16	SMGR	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk
17	TLKM	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
18	TPIA	PT Chandra Asri Petrochemical Tbk
19	UNTR	PT United Tractors Tbk
20	UNVR	PT Unilever Indonesia Tbk

Sumber: Oalah Data Peneliti, 2025

4.2. Hasil Analisis Data

4.2.1. Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum mengenai karakteristik data dari setiap variabel penelitian. Statistik yang digunakan meliputi jumlah data (N), nilai minimum, nilai maksimum, nilai rata-rata (mean), serta standar deviasi. Hasil analisis statistik deskriptif ditampilkan pada Tabel 4.5 berikut:

Tabel 4. 4 Hasil Statistik Deskriptif

Variabel	<i>N</i>	<i>Min</i>	<i>Max</i>	<i>Mean</i>		<i>Std. Deviation</i>
	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Statistic</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Statistic</i>
Dewan Komisaris Syariah	100	0.0000	1.0000	0.033214	0.0150670	0.1506696
Komite Audit	100	3.0000	6.0000	3.150000	0.0657129	0.6571287
Kepemilikan Institusional	100	3.3558	100.0000	43.697515	3.3669523	33.6695226
Profitabilitas	100	-9.1379	75.3200	11.282441	.9588641	9.5886407
Leverage	100	0.1156	95.8785	40.656929	2.7021540	27.0215405
Tax Avoidance	100	10.9091	88.8889	31.839747	1.5207426	15.2074261
Valid N (listwise)	100					

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2025

Berdasarkan tabel yang disajikan diatas, hasil pengujian statistik deskriptif dari 100 data selama periode pengamatan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Syariah

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, diketahui bahwa nilai minimum dari variabel keberadaan dewan komisaris syariah adalah 0, dan nilai maksimum adalah 1. Rata-rata perusahaan yang memiliki dewan komisaris syariah

hanya sebesar 0,033 atau sekitar 3,3%, dengan standar deviasi sebesar 0,150. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan dalam sampel belum menerapkan prinsip syariah secara formal melalui keberadaan dewan komisaris syariah.

2. Komite Audit

Variabel jumlah anggota komite audit memiliki nilai minimum 3 orang dan maksimum 6 orang. Rata-rata jumlah anggota komite audit adalah 3,15 dengan standar deviasi sebesar 0,657. Artinya, mayoritas perusahaan memiliki jumlah komite audit sesuai ketentuan minimal yang berlaku, yaitu 3 orang, dan hanya sedikit perusahaan yang memiliki lebih dari itu.

3. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional dalam perusahaan menunjukkan nilai minimum sebesar 3,36% dan maksimum mencapai 100%. Rata-rata kepemilikan institusional sebesar 43,70%, dengan standar deviasi sebesar 33,67%. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan memiliki porsi kepemilikan institusional yang cukup besar, namun terdapat pula variasi yang cukup tinggi antar perusahaan.

4. Profitabilitas

Profitabilitas perusahaan dalam penelitian ini memiliki nilai minimum sebesar -9,14 dan maksimum 75,32. Rata-rata profitabilitas adalah 11,28 dengan standar deviasi sebesar 9,59. Nilai negatif pada minimum menunjukkan adanya perusahaan yang mengalami kerugian, sedangkan nilai maksimum menunjukkan perusahaan yang memiliki keuntungan yang

tinggi. Secara umum, mayoritas perusahaan berada dalam kondisi menguntungkan.

5. *Leverage*

Leverage atau tingkat penggunaan utang oleh perusahaan menunjukkan nilai minimum sebesar 0,12 dan maksimum 95,88. Nilai rata-ratanya adalah 40,66 dengan standar deviasi sebesar 27,02. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat perusahaan dengan tingkat utang yang sangat tinggi dan juga perusahaan dengan utang yang rendah, dengan rata-rata perusahaan menggunakan sekitar 40% utang dari total modalnya.

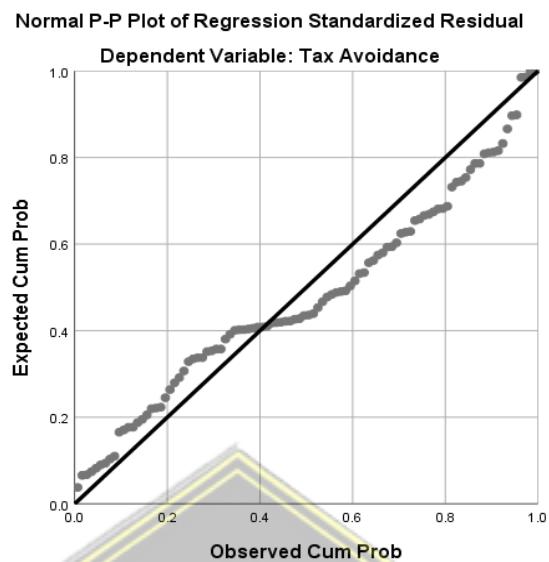
6. *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak)

Variabel penghindaran pajak memiliki nilai minimum sebesar 10,91 dan maksimum 88,89. Nilai rata-rata adalah 31,84 dengan standar deviasi sebesar 15,21. Ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kecenderungan yang cukup bervariasi dalam melakukan penghindaran pajak, dengan rata-rata berada pada tingkat sedang.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik

4.2.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam penelitian ini berdistribusi normal atau tidak. Dalam penelitian ini, uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov. Hasil uji ditunjukkan oleh nilai signifikansi (Sig.) masing-masing variabel. Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini:



Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas P-P Plot Sebelum Transformasi Data

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2025

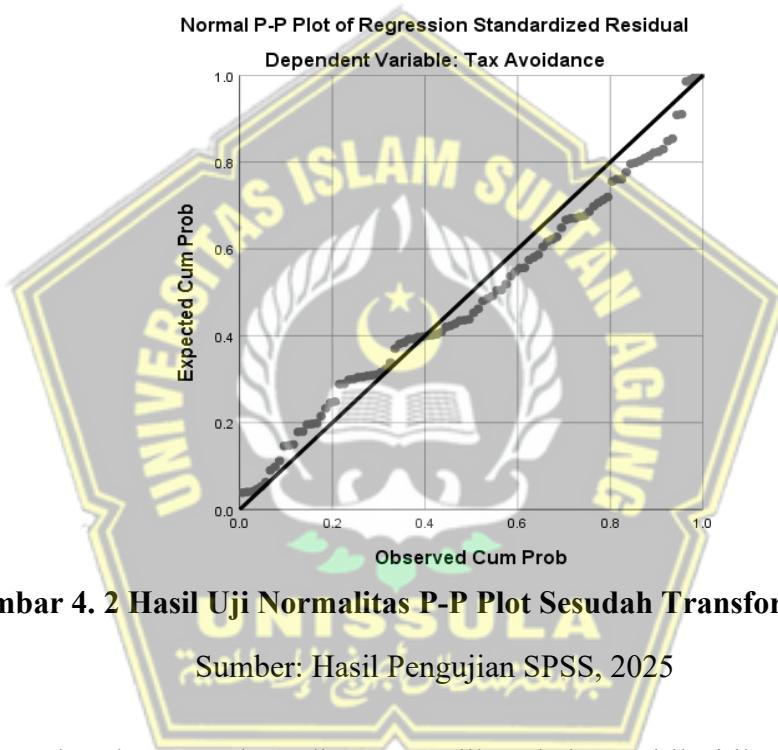
Berdasarkan gambar di atas, terlihat bahwa sebagian besar titik residual mengikuti garis lurus (garis diagonal) yang menunjukkan pola data normal. Walaupun ada sedikit titik yang menyimpang di bagian awal dan akhir grafik, secara umum pola penyebaran titik masih cukup rapi mengikuti garis tersebut. Artinya, data residual dalam model ini bisa dikatakan mendekati normal.

Tabel 4. 5 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Sebelum Transformasi Data

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Dev	10.90900955
Most Extreme Differences	Absolute	0.118
	Positive	0.118
	Negative	-0.084
Test Statistic		0.118
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.002 ^c

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2025

Berdasarkan hasil uji Kolmogorov-Smirnov, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,002 ($< 0,05$), yang menunjukkan bahwa secara statistik data tidak terdistribusi normal. Oleh karena itu, Untuk mengatasi masalah distribusi data yang tidak normal, dilakukan transformasi data menggunakan metode *square root* sebagaimana disarankan oleh Hair et al. (2010). Berikut hasil uji normalitas dalam penelitian ini setelah dilakukan transformasi data:



Gambar 4. 2 Hasil Uji Normalitas P-P Plot Sesudah Transformasi Data

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2025

Berdasarkan gambar di atas terlihat bahwa titik-titik residual hasil transformasi data menggunakan metode *square root* sebagian besar berada dekat atau mengikuti garis diagonal. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran residual mendekati distribusi normal. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa uji normalitas pada model regresi telah terpenuhi secara visual. Dengan demikian, model regresi layak untuk digunakan dalam analisis.

Tabel 4. 6 Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Sebelum Transformasi Data

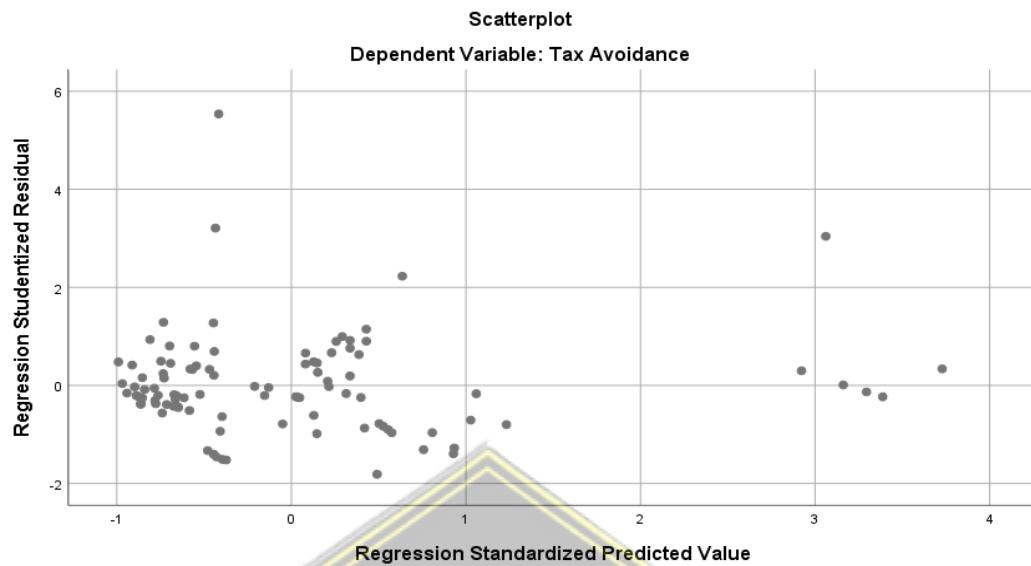
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Dev	0.73346695
Most Extreme Differences	Absolute	0.085
	Positive	0.085
	Negative	-0.075
Test Statistic		0.085
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.070 ^c

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2025

Uji normalitas dilakukan menggunakan metode Kolmogorov–Smirnov setelah data ditransformasi dengan metode square root ($\sqrt{\cdot}$). Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,070, yang lebih besar dari batas signifikansi 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa data residual yang telah ditransformasi berdistribusi normal secara statistik. Dengan demikian, asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi, dan analisis regresi dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

4.2.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terdapat ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. Model regresi yang baik adalah yang memenuhi asumsi homoskedastisitas, yaitu varians dari residual adalah konstan. Jika terjadi ketidaksamaan varians, maka disebut terjadi heteroskedastisitas. Uji ini penting dilakukan karena keberadaan heteroskedastisitas dapat menyebabkan hasil estimasi regresi menjadi tidak efisien (Ghozali, 2011:139).



Gambar 4. 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatterplot Setelah Perbaikan Data

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2025

Uji heteroskedastisitas juga dilakukan menggunakan metode scatterplot. Berdasarkan Gambar di atas, terlihat bahwa titik-titik residual tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, tanpa membentuk pola tertentu seperti garis melengkung atau mengerucut ke atas maupun ke bawah. Penyebaran yang acak ini mengindikasikan bahwa varian residual bersifat konstan (homoskedastis). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini tidak mengandung gejala heteroskedastisitas.

4.2.2.3. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi apakah dalam model regresi terdapat hubungan linear antar variabel independen. Metode ini dilakukan

dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Menurut Ghozali (2011:105), tidak terjadi multikolinearitas jika nilai tolerance $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinearitas Sebelum

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Dewan Komisaris Syariah	0,067	15,034	Terdapat multikolinearitas
Komite Audit	0,065	15,401	Terdapat multikolinearitas
Kepemilikan Institusional	0,888	1,126	Tidak terdapat multikolinearitas
Profitabilitas	0,982	1,018	Tidak terdapat multikolinearitas
Leverage	0,957	1,045	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa variabel Dewan Komisaris Syariah dan Komite Audit menunjukkan gejala multikolinearitas karena memiliki nilai tolerance di bawah 0,10 dan VIF di atas 10. Sementara itu, variabel lainnya tidak menunjukkan adanya multikolinearitas. Dengan demikian, perlu dilakukan *Index Construction / Composite Variable*.

Tabel 4. 8 Hasil Uji Multikolinearitas Sesudah

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
X1X2	.860	1.163	Tidak terdapat multikolinearitas
Kepemilikan Institusional	.892	1.121	Tidak terdapat multikolinearitas
Profitabilitas	.984	1.017	Tidak terdapat multikolinearitas
Leverage	.969	1.032	Tidak terdapat multikolinearitas

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2025

Dari hasil di atas, seluruh variabel memiliki nilai Tolerance di atas 0,10 dan VIF di bawah 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat gejala

multikolinearitas dalam model regresi yang digunakan. Dengan demikian, semua variabel independen layak untuk digunakan dalam analisis regresi selanjutnya.

4.2.2.4. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara residual pada satu observasi dengan residual pada observasi lainnya dalam model regresi.

Tabel 4. 9 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.697 ^a	0.485	0.464	11.1365988	0.924

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2025

Berdasarkan output dari hasil analisis regresi, nilai Durbin-Watson adalah sebesar 0,924. Nilai ini berada jauh di bawah angka 2, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi ini mengalami autokorelasi positif.

4.2.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan dan parsial. Dalam penelitian ini, variabel independen meliputi gabungan Dewan Komisaris Syariah dan Komite Audit (X1X2), Kepemilikan Institusional (X3), Profitabilitas (X4), dan Leverage (X5), sedangkan variabel dependennya adalah Tax Avoidance (Y).

Hasil pengujian regresi linier berganda ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 10 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	B	Std. Error	Beta	t Hitung	Sig.
Konstanta	-6.583	4.716		-1.396	0.166
Gabungan DKS & Komite Audit (X1X2)	28.256	3.440	0.652	8.214	0.000
Kepemilikan Institusional (X3)	-0.124	0.035	-0.274	-3.518	0.001
Profitabilitas (X4)	0.559	0.118	0.353	4.751	0.000
Leverage (X5)	0.033	0.042	0.059	0.793	0.430

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = -6,583 + 28,256X1X2 - 0,124X3 + 0,559X4 + 0,033X5$$

Dimana:

- Y = Tax Avoidance
- X1X2 = Gabungan Dewan Komisaris Syariah dan Komite Audit
- X3 = Kepemilikan Institusional
- X4 = Profitabilitas
- X5 = Leverage

Interpretasi Koefisien Regresi:

1. Koefisien X1X2 (28,256) menunjukkan bahwa jika pengawasan dari gabungan Dewan Komisaris Syariah dan Komite Audit meningkat 1 satuan, maka tax avoidance diperkirakan akan meningkat sebesar 28,256 satuan, dengan asumsi variabel lain konstan. Koefisien ini signifikan ($p = 0,000$).

2. Koefisien X3 (-0,124) menunjukkan bahwa semakin tinggi kepemilikan institusional, maka tax avoidance akan menurun, dengan signifikansi $p = 0,001$.
3. Koefisien X4 (0,559) menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas, maka praktik tax avoidance akan meningkat secara signifikan ($p = 0,000$).
4. Koefisien X5 (0,033) menunjukkan bahwa leverage tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap tax avoidance karena nilai signifikansinya sebesar 0,430 ($> 0,05$).

4.2.4. Uji Hipotesis

Uji hipotesis bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen, baik secara simultan maupun parsial. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai koefisien determinasi, uji F, dan uji t.

4.2.4.1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa besar kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 11 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.697	0.485	0.464	11.137

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, nilai R Square sebesar 0,485 menunjukkan bahwa 48,5% variasi variabel dependen tax avoidance dapat dijelaskan oleh variabel independen, yaitu gabungan Dewan Komisaris Syariah dan Komite Audit,

Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Leverage. Sementara itu, sisanya sebesar 51,5% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nilai Adjusted R Square sebesar 0,464 menunjukkan bahwa setelah disesuaikan dengan jumlah variabel bebas, model ini masih mampu menjelaskan 46,4% variasi variabel dependen, yang menandakan bahwa model memiliki tingkat kecocokan (goodness of fit) yang cukup baik. Sedangkan nilai R sebesar 0,697 menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang cukup kuat antara variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

4.2.4.2. Uji Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara simultan (bersama-sama) berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji F ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 4. 12 Hasil Uji Simultan (Uji F)

Variabel	Jumlah Kuadrat	df	Rata-Rata Kuadrat	F Hitung	Sig.
Regresi	11113.051	4	2778.263	22.401	0.000
Residual	11782.264	95	124.024		
Total	22895.315	99			

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai F hitung sebesar 22,401 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$). Hal ini menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah signifikan secara statistik. Dengan kata lain, variabel independen yang terdiri dari Dewan Komisaris Syariah, Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Profitabilitas, dan Leverage secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, yaitu Tax Avoidance.

4.2.4.3. Uji Simultan (Uji F)

Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji t disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 13 Uji Regresi Linier Berganda – Uji t (parsial)

Variabel	B	Std. Error	Beta	t Hitung	Sig
Konstanta	-6.583	4.716		-1.396	0.166
Dewan Komisaris Syariah & Komite Audit (Gabungan)	28.256	3.440	0.652	8.214	0.000
Kepemilikan Institusional	-0.124	0.035	-0.274	-3.518	0.001
Profitabilitas	0.559	0.118	0.353	4.751	0.000
Leverage	0.033	0.042	0.059	0.793	0.430

Sumber: Hasil Pengujian SPSS, 2025

Berdasarkan hasil regresi, variabel dewan komisaris syariah, komite audit, profitabilitas, dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance ($p < 0,05$). Sementara itu, leverage tidak berpengaruh signifikan ($p = 0,430$).

Pembahasan

1. Pengujian Hipotesis 1

H1: Dewan Komisaris Syariah Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis H1 diterima, yang menunjukkan bahwa Dewan Komisaris Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 8,214 yang lebih besar

dari t tabel, serta nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Koefisien regresi sebesar 28,256 menunjukkan bahwa peningkatan peran Dewan Komisaris Syariah dan Komite Audit secara gabungan berkorelasi dengan meningkatnya praktik penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan dua lembaga pengawas tersebut belum mampu menekan agresivitas pajak perusahaan. Temuan ini dapat dijelaskan oleh kemungkinan bahwa fungsi pengawasan keduanya belum dijalankan secara optimal, baik karena keterbatasan kompetensi teknis dalam aspek perpajakan, kurangnya independensi, maupun fokus pengawasan yang lebih diarahkan pada kepatuhan formal daripada substansi strategi perpajakan. Hal ini sejalan dengan temuan sebelumnya dari Wibowo, Mukhibad, & Anita (2024); Gunawan & Wahyudi (2019); serta Risqiyah & Pramuka (2021), yang menyatakan bahwa pengawasan yang lemah dan kurang spesifik pada aspek pajak dapat membuka peluang terjadinya praktik tax avoidance yang lebih luas dalam perusahaan.

2. Pengujian Hipotesis 2

H2: Komite Audit Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis H2 diterima, yang berarti Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hasil ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 8,214 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, keberadaan mekanisme pengawasan melalui dua entitas ini justru berkorelasi dengan meningkatnya praktik penghindaran pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa Komite Audit belum secara efektif menjalankan fungsi pengawasannya dalam konteks kepatuhan pajak.

Kemungkinan besar hal ini terjadi karena pengawasan yang dilakukan masih bersifat formalitas dan belum menyentuh aspek strategis seperti manajemen pajak agresif. Fokus utama komite audit sering kali tertuju pada kepatuhan terhadap standar akuntansi dan laporan keuangan, sementara aspek perpajakan belum menjadi prioritas pengawasan. Hal ini sesuai dengan temuan beberapa penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa lemahnya pengawasan dalam aspek perpajakan dapat membuka ruang bagi perusahaan untuk melakukan tax avoidance (Wibowo, Mukhibad, & Anita, 2024; Gunawan & Wahyudi, 2019; Risqiyah & Pramuka, 2021; Setiawan & Al-Ahsan, 2018; Utami, 2023).

3. Pengujian Hipotesis 3

H3: Kepemilikan Institusional Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis H3 ditolak, karena hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemilikan institusional justru berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar -3,518 dan nilai signifikansi sebesar 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, semakin besar proporsi kepemilikan institusional dalam perusahaan, semakin rendah kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Temuan ini tidak konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa pemegang saham institusional mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perusahaan, termasuk pengelolaan pajak yang lebih hati-hati dan sesuai aturan (Mary, Pratiwi, & Agtisen, 2019; Sari, Luthan, & Syafriyeni, 2020; Fauzan, Arsanti, & Fatchan, 2021). Pengawasan ketat dari

investor institusional ini dapat meminimalisasi risiko penghindaran pajak yang berlebihan.

4. Pengujian Hipotesis 4

H4: Profitabilitas Berpengaruh Positif terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis H4 diterima, yang berarti profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini dibuktikan dengan nilai t hitung sebesar 4,751 dan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi cenderung melakukan penghindaran pajak secara lebih agresif, kemungkinan untuk memaksimalkan laba bersih melalui strategi pengelolaan pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi memiliki dorongan kuat untuk meminimalkan beban pajaknya sebagai bagian dari strategi efisiensi keuangan. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pajak merupakan komponen biaya yang secara langsung mengurangi laba bersih, sehingga manajemen memiliki insentif untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal demi mempertahankan kinerja keuangan yang optimal di mata pemegang saham. Dalam praktiknya, perusahaan-perusahaan dengan laba besar cenderung memiliki sumber daya, keahlian, dan akses terhadap penasihat pajak yang memungkinkan mereka untuk menyusun skema pengelolaan pajak yang kompleks namun sah secara hukum (legal tax avoidance), seperti transfer pricing, pemanfaatan insentif pajak, atau rekayasa struktur transaksi.

Strategi ini biasanya dilakukan tanpa melanggar ketentuan hukum perpajakan, namun tetap dapat mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan secara signifikan. Dengan demikian, semakin besar profitabilitas perusahaan, semakin besar pula peluang dan motivasi untuk mengeksplorasi celah-celah hukum pajak guna meningkatkan efisiensi fiskal perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori agensi yang menjelaskan bahwa manajemen akan berusaha memaksimalkan nilai perusahaan, salah satunya melalui efisiensi pajak. Selain itu, temuan ini juga diperkuat oleh berbagai penelitian sebelumnya, seperti Wibowo, Mukhibad, & Anita (2024), Risqiyah & Pramuka (2021), serta Gunawan & Wahyudi (2019), yang menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki kinerja keuangan baik dan laba tinggi cenderung lebih agresif dalam mengelola pajaknya. Mereka memiliki kapasitas finansial dan teknis untuk merancang strategi penghindaran pajak secara sistematis dan berkelanjutan, tanpa harus berisiko masuk ke ranah penggelapan pajak yang ilegal.jak yang legal.

5. Pengujian Hipotesis 5

H5: Leverage Berpengaruh Negatif terhadap Tax Avoidance

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis H5 ditolak, karena leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Hal ini ditunjukkan oleh nilai t hitung sebesar 0,793 dan nilai signifikansi sebesar 0,430, yang lebih besar dari 0,05. Artinya, tingkat leverage atau tingkat utang perusahaan tidak memiliki pengaruh yang berarti terhadap kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan tingkat utang yang tinggi cenderung lebih fokus pada upaya pemenuhan kewajiban finansial seperti pembayaran bunga dan cicilan pokok utang, dibandingkan dengan merancang strategi penghindaran pajak, baik yang bersifat legal maupun ilegal. Dalam situasi demikian, efisiensi pajak bukan menjadi prioritas utama karena tekanan likuiditas dan risiko gagal bayar lebih mendesak untuk ditangani.

Hasil ini konsisten dengan sebagian penelitian terdahulu yang juga menemukan tidak adanya hubungan yang signifikan antara leverage dan tax avoidance, seperti yang dilaporkan oleh Sari et al. (2020), Kinasih et al. (2021), Putri & Halmawati (2023), serta Mardania et al. (2024). Namun demikian, beberapa studi lain seperti Prihandini & Mujiyati (2024) menunjukkan adanya pengaruh negatif leverage terhadap tax avoidance. Variasi hasil ini mengindikasikan bahwa pengaruh leverage terhadap tax avoidance sangat kontekstual, tergantung pada karakteristik industri, regulasi perpajakan, serta strategi manajerial perusahaan. Dengan demikian, leverage bukan merupakan determinan utama dalam praktik penghindaran pajak di berbagai sektor industri.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari hasil uji parsial diketahui bahwa variabel gabungan Dewan Komisaris Syariah berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kedua lembaga pengawas tersebut belum mampu mengurangi praktik tax avoidance. Sehingga hipotesis pertama diterima.
2. Dari hasil uji parsial diketahui bahwa variabel gabungan Komite Audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kedua lembaga pengawas tersebut belum mampu mengurangi praktik tax avoidance. Sehingga hipotesis kedua diterima.
3. Hasil uji parsial menunjukkan bahwa Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi proporsi kepemilikan institusional, semakin rendah kecenderungan perusahaan melakukan tax avoidance, karena tekanan dari investor institusional untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Dengan demikian, hipotesis ketiga (H3) ditolak.

4. Dari hasil uji parsial diketahui bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan laba tinggi cenderung melakukan tax avoidance secara lebih agresif. Sehingga hipotesis keempat diterima.
5. Dari hasil uji parsial diketahui bahwa leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat utang perusahaan tidak menjadi faktor dominan dalam menentukan kebijakan penghindaran pajak. Sehingga hipotesis kelima ditolak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait maupun penelitian selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya, sebaiknya melakukan pemisahan antara variabel Dewan Komisaris Syariah dan Komite Audit agar dapat dianalisis secara individual. Penambahan variabel kontrol seperti ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan efektivitas tata kelola perusahaan juga dapat memperkaya hasil penelitian.
2. Bagi Akademisi dan Peneliti, disarankan untuk menggunakan pendekatan campuran (mix-method) dengan menggali data kualitatif melalui wawancara atau studi kasus, agar dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai motif dan praktik tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, K., & Suyono, N. A. (2020). Pengaruh Corporate Govenance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bei Periode 2016 Sampai 2018). *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 1(2), 248-259.
- Cahyanti, B. S., Cik, A., & Digdowiseiso, K. (2024). RETRACTED: Analysis of the Effect of Leverage, Profitability, Company Size, Sales Growth and Institutional Ownership on Tax Avoidance (Empirical Study on Manufacturing Companies Registered on BEI 2017-2021). *Journal of Social Science*, 5(1), 388-405.
- Chintia, V., & Susanto, Y. K. (2022). Pengaruh Corporate Governance terhadap Tax Avoidance. *Media Ilmiah Akuntansi*, 10(1), 43-56.
- Fahreza, I. A., & Fithria, A. (2023). Does The Disclosure Of Islamic Corporate Social Responsibility, Islamic Corporate Governance, Profitability, And Bank Size Affect Tax Avoidance In Islamic Commercial Banks In Indonesia?. *Ultimaccounting Jurnal Ilmu Akuntansi*, 15(2), 222-240.
- Fauzan, F., Arsanti, P. M. D., & Fatchan, I. N. (2021). The effect of financial distress, good corporate governance, and institutional ownership on tax avoidance. *Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 6(2), 154-165.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23* (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2015). *Econometrics by Example*. Palgrave Macmillan.
- Gunawan, M. I., & Wahyudi, I. (2019). Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2013-2017. *JAKU (Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja)(E-Journal)*, 4(4), 1-100.
- Hair, J. F., Hult, G. T. M., Ringle, C. M., & Sarstedt, M. (2014). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Sage Publications.

- Hanum, K., Gusmiarni, G., & Suratman, A. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Leverage, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran KAP sebagai Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 5(1), 73-94.
- Hidayat, K., & Zuhroh, D. (2023). The Impact of Environmental, Social and Governance, Sustainable Financial Performance, Ownership Structure, and Composition of Company Directors on Tax Avoidance: Evidence from Indonesia. *International Journal of Energy Economics and Policy*, 13(6), 311-320.
- Kartika, S. E., Puspitasari, W., & Khoriah, D. M. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, dan Analisa Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Mutiara Ilmu Akuntansi*, 1(2), 86-104.
- Kinasih, R. F. A., Maslichah, M., & Sudaryanti, D. (2021). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan, Strategi Bisnis, Pertumbuhan Penjualan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak. *e_Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 10(07).
- Manita, Y. D., Samsiah, S., & Azhari, I. P. (2022). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 2(1), 18-23.
- Mardania, D., Abbas, D. S., & Hakim, M. Z. (2024). Pengaruh Good Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage dan Fixed Asset Intensity terhadap Tax Avoidance. *GEMILANG: Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 4(1), 60-70.
- Mary, H., Pratiwi, N., & Agtisen, S. D. (2019). Pengaruh Tenure Dewan Komisaris, Independensi Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ekobistik*, 9-20.
- Mukhsin, M., & Herawati, M. (2022). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (JII). *Disclosure: Journal of Accounting and Finance*, 2(1), 1-16.
- Noviyani, R., & Damayanty, P. (2024). The Effect Of Good Corporate Governance, Leverage, And Company Size On Tax Avoidance. *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)*, 7(2), 2433-2443.

- Nurjanah, S., & Aligarh, F. (2021). Family Ownership, Independent Commissioners, Audit Quality, And Tax Avoidance In Indonesia. JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting), 4(2), 82-93.
- Olivia, I., & Dwimulyani, S. (2019, April). Pengaruh thin capitalization dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak dengan kepemilikan institusional sebagai variabel moderasi. In Prosiding Seminar Nasional Pakar (pp. 2-54).
- Pratiwii, I. (2023). The Influence Of The Proportion Of Independent Commisioners, Muslim Directors, Executive Character, And Age Of The Main Director On Tax Avoidance With Company Size As A Moderationg Variable (Case Study: Companies Registered At Issi In 2017-2021). Jurnal Al-Iqtishad, 19(1), 111-132.
- Prihandini, D. A., & Mujiyati, M. (2024). Pengaruh Return on assets (ROA), Leverage dan Corporate Governance terhadap Penghindaran Pajak. Economics and Digital Business Review, 5(2), 869-881.
- Purba, H. (2019). Effect Of Corporate Governance And Profitability On Tax Avoidance (Empirical Study of Sharia Banking Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange 2012-2016). Research Journal of Finance and Accounting, 10(18), 140-151.
- Purwaningsih, E., & Prasetyo, F. B. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Komite Audit, Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance.
- Puteri, M., Tiyandelina, H., & Firasati, A. (2024). The Impact of Profitability and Good Corporate Governance on Tax Avoidance of Food and Beverage Companies. Pamukkale Üniversitesi İşletme Araştırmaları Dergisi, 11(1), 157-174.
- Putri, S. N., Hariyanto, E., Kusbandiyyah, A., & Pandansari, T. (2022). The effect of capital intensity, leverage, and institutional ownership on tax avoidance with profitability as a moderation variable. SAR (Soedirman Accounting Review): Journal of Accounting and Business, 7(2), 86-97.
- Putri, W. A., & Halmawati, H. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Perusahaan

- Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 176-192.
- Putri, W. A., & Halmawati, H. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Tata Kelola Perusahaan terhadap Tax Avoidance: Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 5(1), 176-192.
- Resita, A. D., Wijaya, A. L., & Amah, N. (2021, June). Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perbankan Syariah di Indonesia Periode 2010-2019). In SIMBA: Seminar Inovasi Manajemen, Bisnis, dan Akuntansi (Vol. 2).
- Ridhawati, R., & Mulyani, S. (2022). The Effect Of Managerial Ownership, Institutional Ownership And Audit Committee On Tax Avoidance In Mining Companies Listed On The Idx In 2017-2020. *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 16(2), 148-160.
- Risqiyah, M. F., & Pramuka, B. A. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 21(1), 9-18.
- Risqiyah, M. F., & Pramuka, B. A. (2021). Pengaruh Islamic Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 21(1), 9-18.
- Sara, D. M., Nasir, A., & Darlis, E. (2016). Pengaruh Leverage dan Corporate Governance terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode Tahun 2010-2013)
- Sari, N., Luthan, E., & Syafriyeni, N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), 376-387.
- Sekaran, U. (2016). *Research Methods for Business: A Skill-Building Approach* (7th ed.). Wiley.

- Setiawan, A., & Al-Ahsan, M. K. (2018). Pengaruh Size, Leverage, Profitability, Komite Audit, Komisaris Independen dan Investor Konstitusional terhadap Effective Tax Rate (ETR). *Eka Cida*, 1(2).
- Simanjuntak, V., Wuriyah, A., & Putricellia, S. P. (2024). Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Di Indonesia: Tata Kelola Perusahaan, Profitabilitas, Dan Leverage. *ACE: Accounting Research Journal*, 4(2), 1-19.
- Sudiarto, E., & Nurfaiza, J. (2022). The Impact of Corporate Governance, Disclosure of Corporate Social Responsibility, and Profitability on Tax Avoidance. *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 4(2), 1-10.
- Tanjung, M. R., & Amin, M. N. (2022). Pengaruh leverage, corporate governance dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor keuangan sub sektor perbankan periode 2017-2021. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(2), 567-582.
- Utami, A. A. Y. (2023). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Ukuran Direksi, Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak. *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(6), 4288-4302.
- Wibowo, M. B. A., Mukhibad, H., & Anita, N. (2024). Pengaruh Profitabilitas Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. Book Chapter Akuntansi Publik.
- Widayanti, M. A., & Khabib, N. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Institusional Dan Leverage Terhadap Manajemen Laba Dengan Good Corporate Goverance Sebagai Pemoderasi (Studi pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index periode 2017-2021). *Jurnal Akuntansi Syariah (JAkSya)*, 3(1), 84-96.